



Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
2024

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**

gakkum.menlhk.go.id

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

[DITJENGAKKUM.KLHK](https://www.facebook.com/DITJENGAKKUM.KLHK) [GAKKUM KLHK](https://www.youtube.com/channel/UCGAKKUM_KLHK) [GAKKUM_KLHK](https://www.instagram.com/GAKKUM_KLHK) [GAKKUMKLHK](https://www.tiktok.com/@GAKKUMKLHK)

**HALAMAN BELAKANG COVER
SENGAJA DIKOSONGKAN**



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
REPUBLIC OF INDONESIA

RENCANA KERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen kami untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

#bongkar
realisasi
bangsa



DITJENSAKUM KLHK



DJPHM KLHK



DJPHM_KLHK



ZAKUMKLHK



TIM PENYUSUN

Pengarah :

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.

Penanggungjawab :

Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A.

Ketua :

Ardi Risman, S.Hut, MT, M.PSc.

Koordinator :

Asbiyal Nurdin, S.E.

Anggota :

Arief Santosa, S.Hut., M.Si., M.Sc

Novel Arief, S.E.

Farida Dwi Cahyani, S.Hut.

Agnes Rumenta Setianty Samosir, S.T.

Octa Dandy Saiyar, S.E, M.M.

Disusun dan diterbitkan oleh :

**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan tenaga, kreativitas dan keahliannya untuk menyusun dokumen Rencana Kerja ini.

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4,
Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta.





**KONPERENSI PERS MAKASSAR IN ABSENTIA
KAYU KONTAINER – 23 FEBRUARI 2023**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK.53/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/2023

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, diamanatkan Rencana Kerja di setiap tahun untuk Eselon I, unit kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023;

Mengingat :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Form Discrimination Against Women/CEDAW*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Tahun 209);
15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719);
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian LHK.
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini
- KEDUA : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.
- KETIGA : Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2024, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL,



RASIO RIDHO SANI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Seluruh pejabat Eselon II untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR :
SK.53/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/2023
TENTANG
RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024



HUT SPORC KE - 17 TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) dengan Pagu Anggaran Tahun 2024 ini merangkum strategi kinerja dan alokasi anggaran guna mendukung visi utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), yaitu peningkatan kondisi lingkungan hidup dan kehutanan dalam aspek ekologi, sosial, ekonomi, serta tata kelola, melalui penguatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Harapannya, Rencana Kerja ini dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus memberikan arahan dalam pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

**Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



DR. RASIO RIDHO SANI



DAFTAR ISI

06

PENDAHULUAN



02

KATA
PENGANTAR

23

CAPAIAN
SASARAN

PROGRAM & ANGGARAN



76

PENUTUP



55

RENCANA KERJA
2024

79

LAMPIRAN
LAMPIRAN



DAFTAR HALAMAN

Bab	Uraian Halaman	Hal
	Kata Pengantar	2
I	Pendahuluan	6
A	Latar Belakang	7
B	Kedudukan Tugas dan Fungsi	9
	Visi dan Misi Direktorat Jenderal PHLHK	10
	Tujuan Penegakan Hukum LHK	11
C	Struktur Organisasi	12
D	Sumber Daya Manusia	13
E	Sarana Prasarana	15
F	Pengarusutamaan Gender	16
G	Kewenangan Konkuren Bidang Kehutanan	17
H	Kewenangan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup	18
I	Reformasi Birokrasi	19
II	Capaian dan Prognosis Kinerja & Anggaran	24
A	Capaian dan Prognosis Kinerja	25
B	Capaian dan Prognosis Anggaran	49
C	Kerja Gakkum KLHK TA 2020 s.d 2022	52
D	Monitoring dan Evaluasi Road Map Pengarusutamaan gender 2020 s.d 2024	54
III	Rencana Kerja 2024	55
	Strategi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mendukung Prioritas Nasional	55
IV	Penutup	76
	Lampiran-Lampiran	79

DAFTAR TABEL

Uraian Tabel	Hal
Data SDM Terpilah <i>Sex Aggregated Data</i> dan Tingkat Pendidikan (1 November 2023)	13
Data SDM Fungsional terpilah <i>Sex Aggregated Data</i> , Tingkat Pendidikan, Usia	14
Rincian Alokasi Anggaran RPJMN 2020 s.d 2024	26
Rincian Alokasi Anggaran RENSTRA 2020 s.d 2024	27
Rincian Alokasi Anggaran RENSTRA 2020 s.d 2024 (REVISI)	28
Tren Alokasi, Prognosis dan Realisasi Anggaran Ditjen PHLHK	29
Tren Alokasi Anggaran Per Program bidang LHK	30
Tren Alokasi Anggaran Program Lingkungan Hidup	31
Tren Target Persentase Penataan	33
Trend Target Pengawasan Usaha	34
Trend Target Peningkatan Kapasitas PPLH	35
Trend Target Jumlah Kasus Pidana dan Perdata LHK	36
Trend Target Jumlah Kasus Pidana (P-21)	36
Trend Target Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	36
Trend Peningkatan Kapasitas PPNS	40
Trend Alokasi Anggaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	41
Trend Luas Hutan yang diamankan	42
Trend Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	45
Trend Alokasi Anggaran Program Dukungan Manajemen	47
Trend Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	48
Prognosis Target Tahun 2023	53
Rencana Kerja Pemerintah TA 2024	64
Rencana Kerja Tahun 2024 per Program	66
Alokasi Anggaran per Satuan Kerja	74



BAB I

PENDAHULUAN

**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

A. LATAR BELAKANG

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

- Visi Presiden Joko Widodo, RPJMN 2020 s.d 2024



Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam melanjutkan tongkat estafet pembangunan, dengan mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Pemilihan tema ini didasarkan pada arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, hasil forum konsultasi publik, dan kerangka ekonomi makro. Selain itu, tema ini juga mempertimbangkan isu strategis, dinamika paradigma Pemerintah, serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Penyusunan RKP mengikuti regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Dengan mengambil tema diatas, RKP Tahun 2024 bertujuan tidak hanya untuk menjaga stabilitas politik dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, tetapi juga sebagai pondasi bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman dan kondusif. Dokumen ini memfokuskan upayanya pada percepatan transformasi ekonomi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri, penguatan riset terapan, serta daya saing usaha.

Melalui RKP Tahun 2024, Pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan inklusif, pengurangan kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan transisi energi. Dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, dan kerusakan lingkungan, RKP menjadi instrumen strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Tantangan pembangunan nasional tahun 2024 mencakup penyelesaian target prioritas nasional RPJMN 2020-2024, khususnya proyek-proyek besar. Sebagai tahun politik, 2024 juga menjadi awal landasan untuk penyusunan RPJMN 2025-2030.

RKP Tahun 2024 disusun dengan tujuan menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi badan usaha dan *non-state actor* untuk berpartisipasi dalam mendukung pencapaian prioritas nasional. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, RKP Tahun 2024 menjadi kelanjutan dari RPJMN Tahun 2020-2024, dengan tujuh agenda pembangunan yang tetap menjadi prioritas nasional untuk mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

LANDASAN HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian LHK

Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK

TUGAS

- Pasal 35, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020;
- Pasal 492, Permen LHK Nomor P.15 tahun 2021;

“ menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. “

FUNGSI

- Pasal 36, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020
- Pasal 493, Permen LHK Nomor P.15 tahun 2021



1. Perumusan Kebijakan
2. Pelaksanaan Kebijakan
3. Penyusunan Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan
5. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
6. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
7. Pelaksanaan Tugas Administrasi Ditjen PHLHK
8. Pelaksanaan Tugas Fungsi Lain yang diberikan oleh Menteri LHK

“ ... dibidang penyelenggaraan **pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi** Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.”

Visi dan Misi :

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

VISI

“ Terwujudnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkualitas dan berkeadilan demi keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI

1

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif melalui sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, responsif, dan inovatif serta berkesetaraan *gender*

3

Penguatan ekosistem penegakan hukum LHK melalui pengembangan instrumen, kelembagaan, tata kelola kolaboratif, kapasitas sumber daya manusia serta dukungan pengambilan keputusan;

2

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasis sains dan teknologi yang mengedepankan norma dan budaya hukum;

4

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang konsisten, bermartabat, dan terpercaya.

Tujuan :

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TUJUAN

“ Sebagai organisasi penegak hukum, Ditjen Gakkum LHK juga memiliki tujuan esensial yang melandaskan organisasi ini berdiri dan mengakar pada tugas dan fungsi organisasi.

“

1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

2 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, inovasi, dan kelembagaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

3 Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum serta keamanan lingkungan hidup dan kehutanan;

4 Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM,.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A

Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Jasmin Ragil, SH, MH

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



Ardyanto Nugroho, S.Hut., MM

Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Ir. Sustyo Iriyono, M.Si

plt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Yazid Nurhuda, SH, MA

Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Subhan, S.Hut, M.Si.

Kepala Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera



Taquiuddin, S.Hut, M.P.

Kepala Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



David Muhammad, S.Sos. M.H.

Kepala Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan



Aswin Bangun, S.Hut., M.Si.

Kepala Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi



Leonardo Gultom, S.Sos, M.Si.

Kepala Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua

ESELON I

ESELON II

ESELON III

D. SUMBER DAYA MANUSIA

1.340

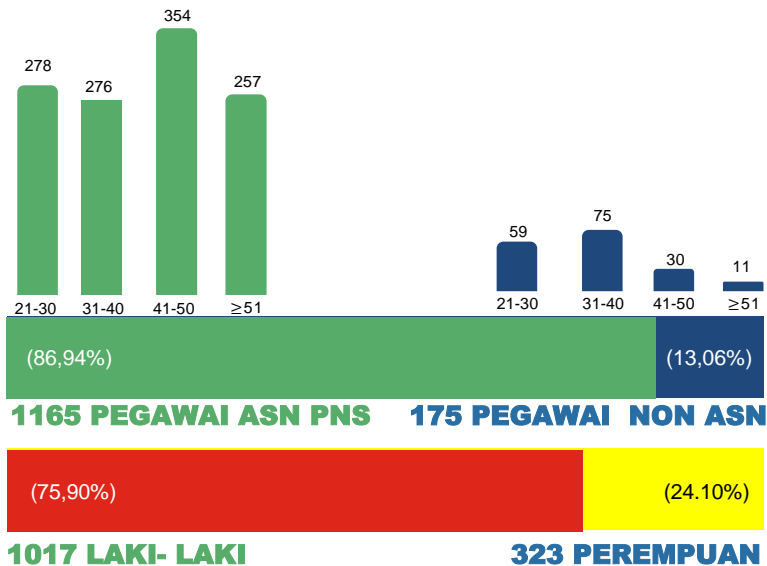
Total Data Pegawai

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Data per 1 November 2023.

DATA TERPILAH		ASN PNS		ASN PPPK	NON ASN		TOTAL
		PUSAT	UPT	PUSAT	PPNPN	KONTRAK	
SMP	PEREMPUAN	0	0	0	3	0	3
	LAKI LAKI	0	0	0	1	0	1
SMA	PEREMPUAN	3	326	0	48	4	381
	LAKI LAKI	11	19	0	12	12	54
D3	PEREMPUAN	19	27	1	4	0	51
	LAKI LAKI	16	38	0	4	3	61
S1	PEREMPUAN	94	81	3	37	4	219
	LAKI LAKI	80	320	2	41	2	445
S2	PEREMPUAN	15	8	0	1	0	24
	LAKI LAKI	33	61	0	2	1	97
S3	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0
	LAKI LAKI	4	0	0	0	0	4
Total		275	880	6	153	26	1340

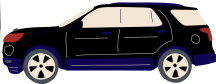







Tabel. Sebaran SDM Terpilah menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin (*Sex Aggregated Data*) terhadap ASN dan Non ASN.



Gambar. Total ASN dan NON ASN terpilah Range Usia dan Jenis Kelamin (*Sex Aggregated Data*).

E. SARANA PRASARANA

Kondisi Total per 11 Agustus 2023

	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
 Mobil Patroli/Intelijen	82	11	5	98
 Mobil Pengawas/ Penyidik	15	0	0	15
 Mobil Tahanan	6	0	0	6
 Motor Patroli	102	9	4	115
 Drone (Kamera Udara)	86	7	13	106
 GPS	153	5	41	199
 Laptop	907	41	107	1055
 Senjata Api	2191	54	0	2245

F. PENGARUSUTAMAAN GENDER

4 (empat) Prioritas dan Sasaran Road Map Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen Gakkum LHK TA 2020 s.d 2024.



Peningkatan Kapasitas Staff untuk Mengimplementasikan *Practical Gender Concern*

- Meningkatkan pengetahuan tentang **konsep gender dan penghapusan stereotip gender** dikalangan Ditjen Gakkum LHK
- Memastikan pemahaman bersama mengenai **kesetaraan gender** melalui perubahan kelembagaan serta implikasinya dan **komitmen terhadap anti pelecehan dan eksploitasi seksual**



Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Sensitif Gender

- **Fasilitas yang Responsif Gender** di lingkungan kerja Ditjen Gakkum LHK



Pengarusutamaan Gender dalam Reformasi Kebijakan dan Peraturan

- Pengembangan **kebijakan dan peraturan** dalam kerangka **yang responsif gender** dalam lingkungan Ditjen Gakkum LHK
- Pembentukan Sistem dan Mekanisme Pengaduan yang responsif Gender



Monitoring dan Evaluasi yang Responsif Gender

- **Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi yang responsif** gender yang dapat menggambarkan manfaat program dan dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki

G. KEWENANGAN KONKUREN

BIDANG KEHUTANAN

Isu strategis bidang kehutanan di daerah yaitu kejahatan dan perdagangan ilegal TSL, pengendalian dan dampak kebakaran hutan dan lahan, peran cabang dinas kehutanan, keterbatasan Pemda terkait anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kebijakan daerah.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 PEMERINTAH DAERAH



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

H. KEWENANGAN KONKUREN

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Isu strategis bidang lingkungan di daerah yaitu penegakan hukum lingkungan, sampah, limbah industri/domestik/usaha skala kecil, limbah medis, kebakaran hutan dan lahan, bahan berbahaya dan beracun (B3), penambangan tanpa izin, sampah spesifik, limbah cair domestik, pencemaran industri berbasis lahan, reklamasi pasca tambang (pengawasan dan akuntabilitas), pembuangan limbah minyak, keterbatasan pemerintah daerah terkait anggaran, SDM, sarana prasarana dan kebijakan daerah.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 PEMERINTAH DAERAH

MASUKAN DITJEN GAKKUM LHK
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

RUANG LINGKUP PENEGAKAN
HUKUM BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP YANG MERUPAKAN
KEWENANGAN PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

- PEMBENTUKAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
- PENGEMBANGAN KAPASITAS PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
- PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
- PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
- PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (P-21)
- PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYIDIK PNS LHK

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15..5 - 1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEMENDAGRI
050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

I. REFORMASI BIROKRASI

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan efisiensi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK), terdapat delapan area perubahan yang diarahkan untuk memperkuat transformasi birokrasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjadikan institusi ini sebagai entitas publik yang modern, unggul, dan berintegritas.



KINERJA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI

Perubahan paradigma pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) pada pertengahan tahun 2023 menghadirkan terobosan signifikan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dua fokus utama diperkenalkan sebagai strategi pelaksanaan RB, yang dikenal sebagai '*double track*'. Dua fokus ini terbagi menjadi RB General, yang memusatkan perhatian pada penyelesaian isu hulu, dan RB Tematik, yang berfokus pada penyelesaian isu hilir.

Penting untuk dicatat bahwa pada tahun 2023, kegiatan RB tidak lagi terkait dengan delapan area perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020. Sebaliknya, pendekatan yang diambil lebih berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023.

Perubahan ini mencerminkan evolusi dalam pembangunan Reformasi Birokrasi, di mana penekanan diberikan pada upaya percepatan untuk mencapai hasil yang lebih tangkas dan terukur. Dengan adanya dualitas fokus antara RB General dan RB Tematik, diharapkan upaya reformasi birokrasi dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kompleksitas isu yang dihadapi di tingkat hulu dan hilir.

Penerapan strategi '*double track*' ini diharapkan membawa dampak positif terhadap kinerja birokrasi, mempercepat pencapaian tujuan reformasi, dan memastikan ketangguhan sistem administrasi pemerintahan di tengah perubahan dinamis di berbagai sektor.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaksanakan mandat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023. Dalam konteks RB Tematik, Kementerian LHK berhasil berkontribusi dalam menyelesaikan keempat dari empat program prioritas nasional yang tercantum dalam sektoral RB Tematik tahun 2020-2024. Pelaksanaan program ini dipandu oleh beberapa unit eselon I yang ditunjuk sebagai koordinator (*leading unit*), menunjukkan keterlibatan penuh dalam mendukung upaya reformasi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Melalui peran proaktif dan koordinatif dari unit eselon I sebagai *leading unit* serta distribusi indeks pada seluruh unit kerja, Kementerian LHK berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam struktur dan kinerja birokrasi, mendukung visi pembangunan nasional, dan meningkatkan efektivitas layanan publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



RB General

RB memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah (*problem hulu*)

- Tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif
- Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN profesional



RB Tematik

RB mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional (*problem hilir*)

INDIKATOR CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL

Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Tingkat Maturitas SPIP
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Nilai SAKIP
Indeks Perencanaan Pembangunan	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
Tingkat Digitalisasi Arsip	Transformasi Layanan Digital
Indeks Pengelolaan Aset	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) Yang Diselesaikan
Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Tata Kelola Pengadaan
Indeks Sistem Merit	Indeks Pelayanan Publik



PEMADAMAN KARHUTLA, KALIMANTAN BARAT
4 s.d 9 SEPTEMBER 2023





BAB II

CAPAIAN & PROGNOSIS

**KINERJA DAN ANGGARAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



**SATGAS PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN UDARA
WILAYAH JABODETABEK KLHK - 8 SEPTEMBER 2023**

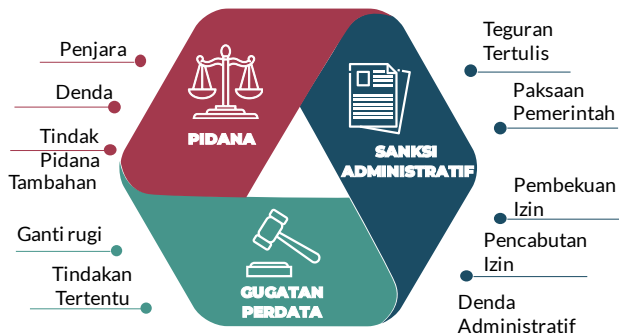
A. CAPAIAN DAN PROGNOSIS KINERJA

Gakkum KLHK telah secara konsisten melaksanakan tindakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong budaya ketaatan dari pelaku usaha dan menciptakan efek jera bagi mereka yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pentingnya lingkungan yang baik dan sehat diakui sebagai hak asasi konstitusional setiap warga Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sehingga lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, terutama seiring dengan tahun terakhir RPJMN 2020-2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51 Tahun 2017, Rencana Kerja yang disusun perlu mencantumkan Capaian T-1 dan Prognosis di tahun berjalan, khususnya pada Tahun 2023. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tren alokasi anggaran dan kinerja, diperlukan penambahan data sejak tahun 2020. Hal ini akan memungkinkan analisis yang lebih rinci dan komparatif atas *multivariable* yang menjadi perbincangan utama oleh para stakeholder terkait.

Dengan demikian, penambahan data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat terkait pencapaian serta proyeksi anggaran dan kinerja hingga tahun 2024. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan di masa mendatang.

INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



RINCIAN ALOKASI ANGGARAN

RPJMN 2020 s.d 2024

Total indikasi belanja non-operasional RPJMN Tahun 2020 s.d. 2024 dalam bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang termasuk dalam Prioritas Nasional dan dua program di lingkup Kementerian tersebut, adalah ±3.470,6 miliar rupiah. Rinciannya sebagai berikut:

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup : ±1.893,6 miliar rupiah

2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: ±1.577 miliar rupiah

Perlu dicatat bahwa RPJMN 2020 s.d. 2024 belum mencakup belanja prioritas bidang Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan yang terkait dengan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Demikian pula, Program Dukungan Manajemen juga belum terakomodasi dalam RPJMN tersebut.

Adanya perbedaan anggaran antara 2 (dua) program tersebut mencerminkan alokasi sumber daya untuk mendukung upaya lingkungan hidup dan kehutanan sesuai arahan prioritas nasional. Namun, perlu pertimbangan lebih lanjut untuk memastikan bahwa belanja yang dialokasikan mencakup seluruh aspek penting, termasuk peningkatan kapasitas polisi kehutanan dan dukungan manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor ini.

RPJMN 2020 s.d 2024	2020	2021	2022	2023	2024	Total Anggaran*
Jumlah Operasi Pengamanan Hutan	100	130	140	160	180	548,4
Jumlah Operasi Pembalakan Liar, TSL	110	250	300	380	400	1028,6
Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan PUU Bidang LHK	1000	1500	1700	1950	2100	489,2
Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200	550	700	800	900	178,5
Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Berkas Lengkap)	173	285	315	350	400	584,6
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	46	102	112	122	140	330,6
jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	210	500	600	750	1000	311,7

* Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN

RENSTRA 2020 s.d 2024

Total indikasi belanja Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun 2020 s.d. 2024 mencapai ±4.386 miliar Rupiah. Dari total tersebut, sekitar ±3.469 miliar Rupiah adalah untuk indikator kinerja terkait bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adanya tambahan indikator kinerja Jumlah Polisi Kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya menunjukkan komitmen untuk memperkuat peran penegakan hukum dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Meskipun tambahan indikator ini belum diakomodir dalam RPJMN 2020 s.d. 2024, tetapi mencerminkan upaya untuk terus meningkatkan kapasitas dan efektivitas Polisi Kehutanan.

Perlu dicatat bahwa alokasi anggaran ini adalah bagian dari strategi lebih luas Ditjen PHLHK dalam mendukung prioritas nasional terkait penegakan hukum di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Rinciannya akan mencakup berbagai kegiatan dan proyek yang bertujuan untuk mengatasi tantangan dan masalah di bidang ini, termasuk peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan yang menjadi fokus tambahan pada alokasi anggaran.

Rencana Strategi 2020 s.d 2024	2020	2021	2022	2023	2024	Total Anggaran
Program Dukungan Manajemen						917
Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	72	74	76	78	80	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						1.577
Jumlah Operasi Pengamanan Hutan	100	130	140	160	180	
Jumlah Operasi Pembalakan Liar, TSL	110	250	300	380	400	
Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	615	635	655	675	695	
Program Kualitas Lingkungan Hidup						1.892
Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan Peraturan PerundangUndangan terkait Bidang LHK	1000	1500	1700	1950	2100	
Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	200	550	700	800	900	
Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap (kasus)	173	285	315	350	400	
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (kasus)	46	102	112	122	140	
Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	210	500	600	750	1000	

Data diatas sesuai Peraturan Direktur Jenderal Nomor P.6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024 tanggal 7 September 2020.

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN

RENSTRA 2020 s.d 2024 (Revisi)

Total indikasi belanja Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun 2020 s.d. 2024, setelah direvisi, mencapai ±1.765 miliar Rupiah. Dari total tersebut, sekitar ±764 miliar Rupiah dialokasikan untuk indikator kinerja terkait bidang PHLHK.

Penambahan indikator kinerja termasuk Jumlah Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya dan Jumlah Berkas Perkara Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan menunjukkan komitmen Ditjen PHLHK untuk memperkuat peran penegakan hukum dalam mengatasi masalah lingkungan hidup dan kehutanan. Meskipun tambahan indikator ini belum diakomodir dalam RPJMN 2020 s.d. 2024, tetapi mencerminkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas penegakan hukum di sektor ini.

Alokasi anggaran ini akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan proyek yang berkaitan dengan penegakan hukum, peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan, dan penyelesaian perkara terkait penggunaan kawasan hutan. Hal ini menjadi bagian integral dari strategi Ditjen PHLHK untuk mencapai tujuan prioritas nasional terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Strategi 2020 s.d 2024 Revisi	2020	2021	2022	2023	2024	Total Anggaran
						1.765
Program Dukungan Manajemen						1.001
Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	72	74	76	78	80	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						266
Jumlah Operasi Pengamanan Hutan	89	63	31	160	180	
Jumlah Operasi Pembalakan Liar, TSL	197	42	28	220	250	
Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	210	342	400	350	400	
Program Kualitas Lingkungan Hidup						498
Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang Undangan terkait Bidang LHK	726	505	750	1800	1900	
Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya (orang	209	100	150	800	900	
Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap (kasus)	220	130	110	300	350	
Jumlah Berkas Perkara Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	0	0	50	60	70	

Data diatas sesuai Peraturan Direktur Jenderal Nomor P.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor P.6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024 tanggal 17 Februari 2022.

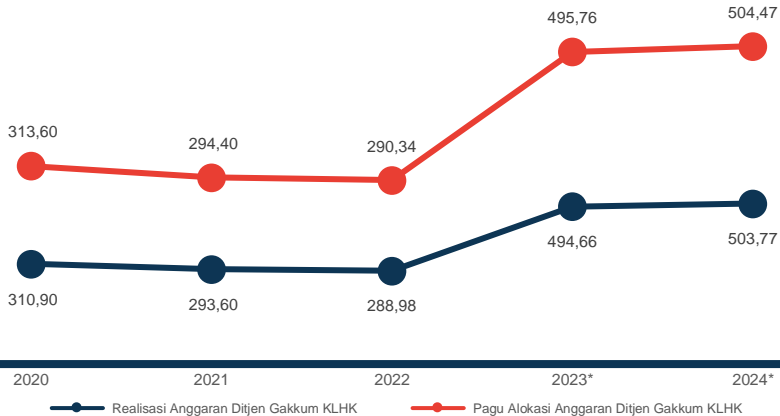
TREN ALOKASI ANGGARAN DITJEN PENEGAKAN HUKUM LHK

Total Alokasi Anggaran Ditjen PHLHK periode Tahun 2020 s.d. 2024 mencapai ±1.898,57 miliar rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari Realisasi tahun 2020 s.d 2022 dan Prognosis tahun 2023 s.d 2024 yang tercantum dalam Pagu Anggaran pada Dokumen Rencana Kerja, dengan nilai sekitar ±1.898,57 miliar rupiah.

Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan melebihi 99,75% secara rata-rata per tahun. Anggaran tertinggi di Tahun 2023 berasal dari Skema Top Up PNPB, dengan Prognosis Realisasi Anggaran melebihi 99%. Rata-rata Alokasi Pagu Anggaran sekitar 379,71 miliar rupiah, mengalami peningkatan di tahun 2023 s.d. 2024 dari Skema Top Up PNPB.

NAMA K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UKE I : DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Tahun	Realisasi Anggaran Ditjen PHLHK	Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PHLHK
2020	310,90	313,60
2021	293,60	294,40
2022	288,98	290,34
2023*	495,76	494,66
2024*	503,77	504,47

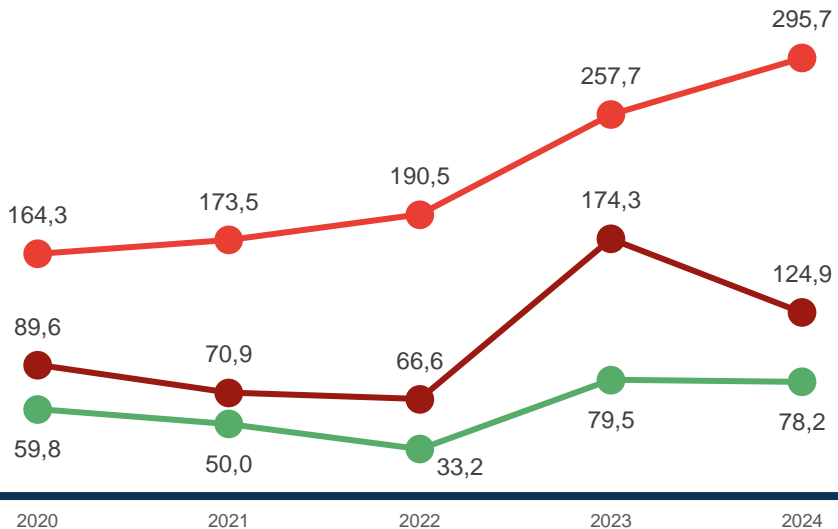
* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

TREN ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM BIDANG LHK

Total Alokasi Anggaran Ditjen PHLHK periode Tahun 2020 s.d. 2024 mencapai ±1.908,7 Miliar Rupiah. Rincian per program tercantum dalam Pagu Anggaran pada Dokumen Rencana Kerja per 31 Desember setiap tahun.

NAMA K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UKE I : DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



—●— Program Dukungan Manajemen —●— Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan —●— Program Kualitas Lingkungan Hidup

Anggaran Rencana Kerja	2020	2021	2022	2023*	2024*	Total
Program Dukungan Manajemen	164,3	173,5	190,5	257,7	295,7	1.082
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	59,8	50,0	33,2	79,5	78,2	301
Program Kualitas Lingkungan Hidup	89,6	70,9	66,6	174,3	124,9	526
Sub Total	313,7	294,4	290,3	511,5	498,8	1.908,7

* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

TREN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP

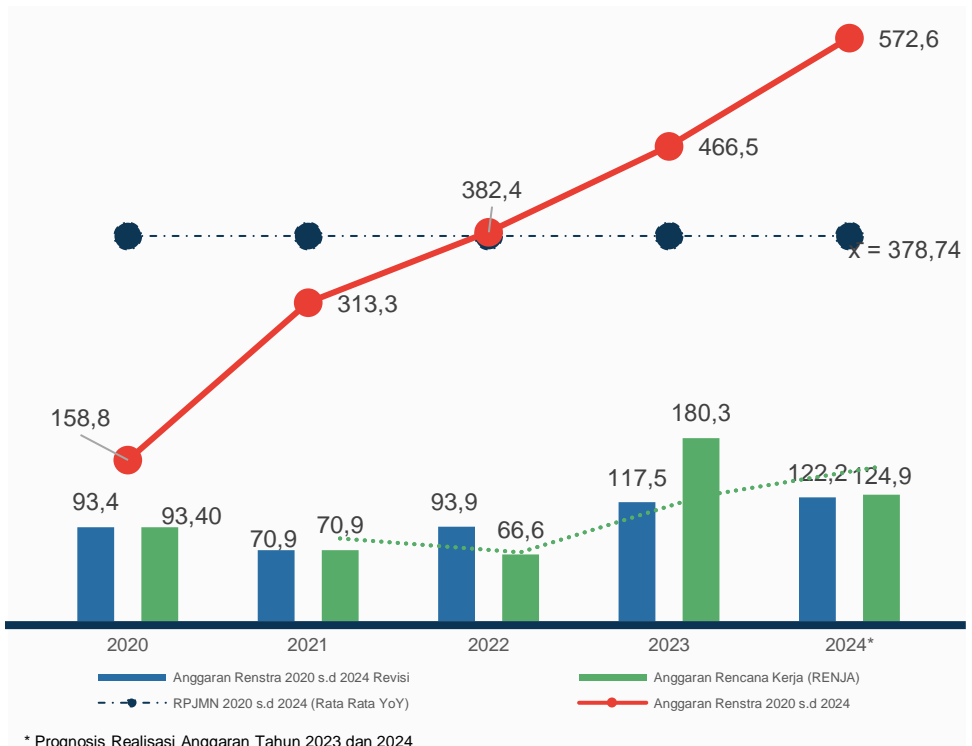
Rasio alokasi anggaran untuk Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah 1:0,283. Total indikasi belanja non-operasional RPJMN Tahun 2020 s.d. 2024 mencapai ±1.893,7 Miliar Rupiah. Jumlah tersebut terkait dengan total rencana kerja tahun anggaran 2020 s.d. 2024 sebesar ±546,1 Miliar Rupiah untuk Program Kualitas Lingkungan Hidup.

NAMA K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PILAR : LINGKUNGAN

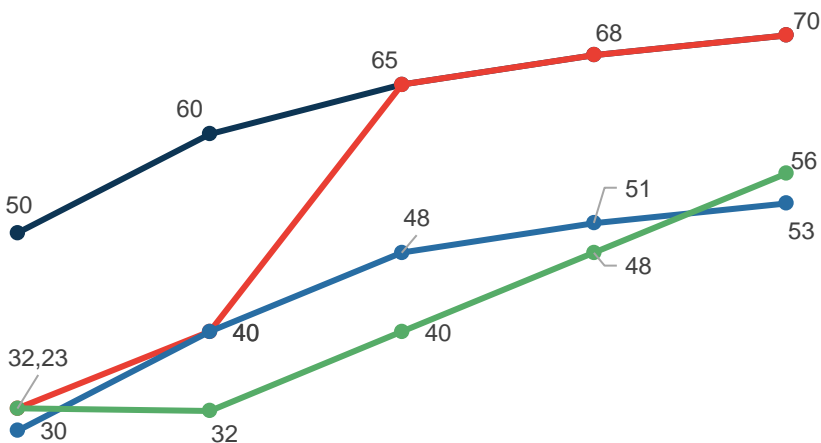
TUJUAN : KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG SEMAKIN TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

PROGRAM : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (KLH)



CAPAIAN DAN PROGNOISIS INDIKATOR KINERJA UKE I

Target peningkatan tingkat penataan perusahaan sebesar 70% merupakan fokus dalam RPJMN dan RENSTRA Direktur Jenderal PHLHK hingga tahun 2024. Meskipun terdapat pencapaian sebesar 40% pada tahun 2022, terdapat gap sebesar 30% antara pencapaian aktual dan target yang telah disepakati. Prognosis penataan perusahaan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran menunjukkan adanya gap sebesar 14% pada tahun 2024. Meskipun telah mencapai 56% dari usulan target 53%, tantangan optimalisasi masih diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 70%.



2020

2021

2022

2023*

2024*

● Target RPJMN/Renstra
2020 s.d 2024

● Target Renstra 2020 s.d 2024 Revisi

● Target Persentase Penataan

● Capaian Persentase Penataan

* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

NAMA K/L	: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PILAR	: LINGKUNGAN
TUJUAN	: KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG SEMAKIN TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
PROGRAM	: KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (KLH)
SASARAN UKE I	: MENINGKATNYA BUDAYA KETAATAN TERHADAP PERUNDANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INDIKATOR KINERJA UKE I	: PERSENTASE PEMEGANG IZIN YANG TAAT TERHADAP PERATURAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024*
Target RPJMN/Renstra 2020 s.d 2024	50	60	65	68	70
Target Renstra 2020 s.d 2024 Revisi	32,23	40	65	68	70
Target Persentase Penaatan	30	40	48	51	53
Capaian Persentase Penaatan	32,23	32	40	48	56

KEGIATAN	: PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI (5430)
SASARAN KEGIATAN	: MENINGKATNYA PELAKU USAHA/KEGIATAN YANG DIAWASI TERHADAP PERIZINAN DAN PERATURAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: JUMLAH USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP PERATURAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024*
Target RPJMN/Renstra 2020 s.d 2024	1000	1500	1700	1950	2100
Target Renstra 2020 s.d 2024 Revisi	726	505	750	1800	1900
Target Renja Badan Usaha	550	505	700	1.048	800
Capaian Renja Badan Usaha	726	766	910	1.050	930
Jumlah Usaha yang diawasi	236	252	443	580	455
Jumlah Pengaduan Perusahaan	490	453	467	470	475

* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

CAPAIAN DAN PROGNOISIS

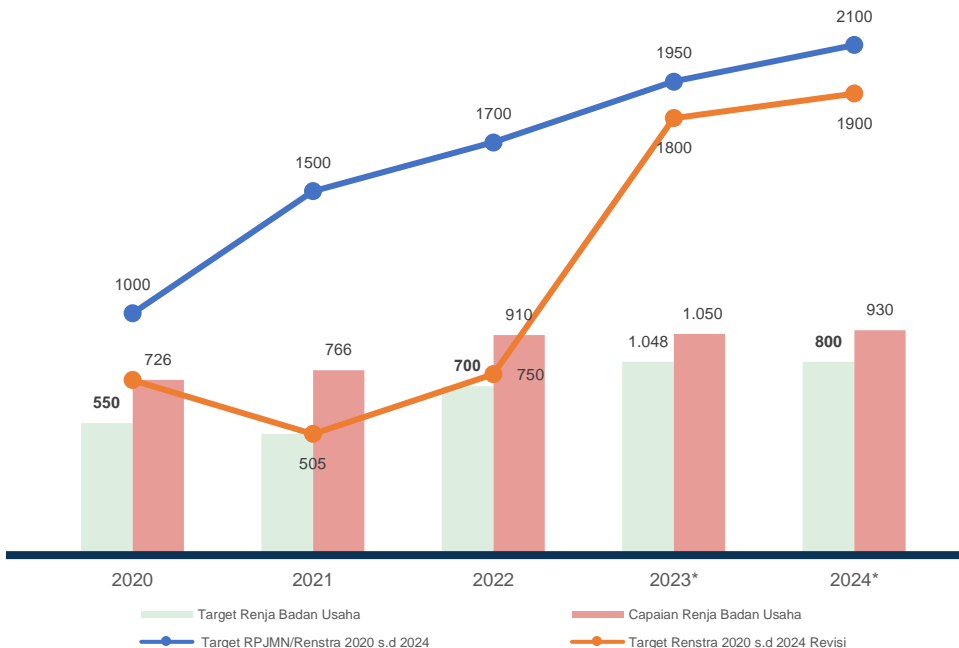
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Rasio badan usaha sebesar 1:0,515 mencerminkan perbandingan target indikator kinerja jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatannya terhadap peraturan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Terdapat total 8.250 badan usaha dalam dokumen RPJMN dan 5.681 badan usaha dalam dokumen Revisi RENSTRA Direktur Jenderal PHLHK hingga tahun 2024.

Prognosis menunjukkan adanya 4.247 badan usaha hingga tahun 2024 dari target total 3.355 badan usaha. Oleh karena itu, terdapat gap sebesar 4.003 badan usaha dengan RPJMN dan 1.434 badan usaha pada Renstra Revisi Ditjen HLHK yang perlu dioptimalisasi.

RINCIAN OUTPUT : PENGAWASAN KETAATAN LHK TERHADAP BADAN USAHA

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT : (QIH) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BADAN USAHA



* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

CAPAIAN DAN PROGNOSIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

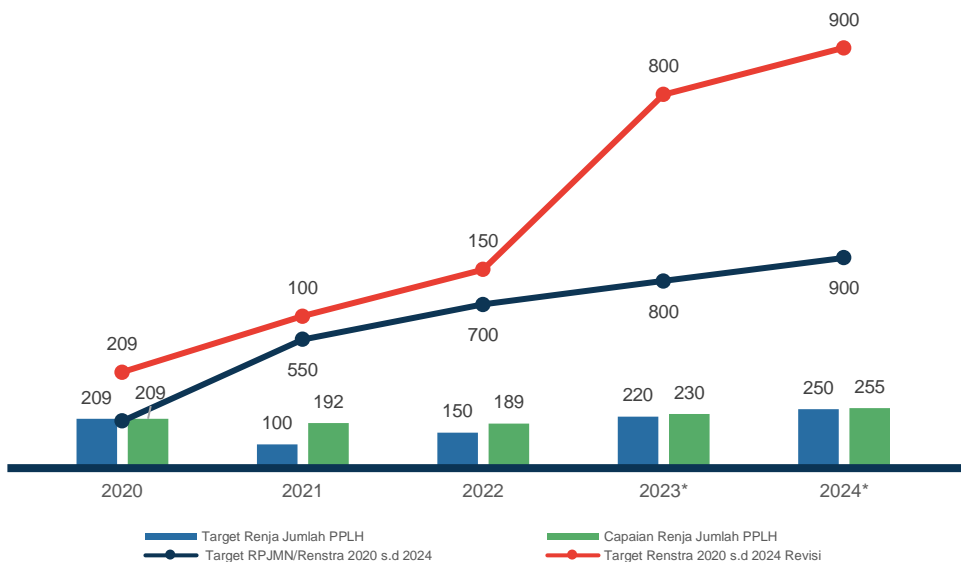
Rasio PPLH sebesar 1:0,3413 mencerminkan perbandingan target indikator kinerja jumlah peningkatan kapasitas PPLH terhadap total 3.150 orang dalam dokumen RPJMN dan 2.159 orang dalam dokumen Revisi RENSTRA Direktur Jenderal PHLHK hingga tahun 2024.

Prognosis menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1.075 orang hingga tahun 2024 dari target total 929 orang. Oleh karena itu, terdapat gap sebesar 2.075 orang dengan RPJMN dan 1.084 orang pada Renstra Revisi Ditjen PHLHK yang perlu dioptimalisasi.

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024*
Target RPJMN/Renstra 2020 s.d 2024	200	550	700	800	900
Target Renstra 2020 s.d 2024 Revisi	209	100	150	800	900
Target Renja Jumlah PPLH	209	100	150	220	250
Capaian Renja Jumlah PPLH	209	192	189	230	255

RINCIAN OUTPUT : PENINGKATAN KAPASITAS PPLH

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT : (DCE) PENINGKATAN KAPASITAS PPLH



* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

NAMA K/L	: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PILAR	: LINGKUNGAN
TUJUAN	: KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG SEMAKIN TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
PROGRAM	: KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (KLH)
SASARAN UKE I	: TERSELESAIKANNYA KASUS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INDIKATOR KINERJA UKE I	: JUMLAH KASUS PIDANA DAN PERDATA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Uraian	2020	2021	2022*	2023*	2024*
Target RPJMN 2020 s.d 2024	219	387	427	472	540
Target Renstra Perubahan	273	152	182	498	570
Target Renja	153	152	182	480**	370
Realisasi Renja	273	234	226	481	380

KEGIATAN	: PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SASARAN KEGIATAN	: MENINGKATNYA KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN P-21
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: JUMLAH KASUS PIDANA LHK YANG DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN P-21 (BERKAR PERARA DINYATAKA LENGKAP)

RINCIAN OUTPUT	: KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	: PENANGANAN PERKARA (QCE)

Uraian	2020	2021	2022*	2023*	2024*
Target Pidana P-21	220	186	153	166**	180
Capaian Pidana P-21	220	186	153	170	190
Target Berkas Perkara	n/a	n/a	50	250**	200
Capaian Berkas Perkara	n/a	n/a	50	255	205

KEGIATAN	: PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
SASARAN KEGIATAN	: MENINGKATNYA PERKARA SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP YANG DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: JUMLAH SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP YANG DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN
RINCIAN OUTPUT	: PENANGANAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	: PENANGANAN PERKARA (QCE)

Uraian	2020	2021	2022*	2023	2024
Target RPJMN 2020 s.d 2024	46	102	112	122	140
Target Renstra Perubahan 2020 s.d 2024	53	22	22	138	150
Rencana Kerja Perkara Perdata	53	22	22	64	45
Capaian Perkara Perdata	53	48	36	65	66

* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

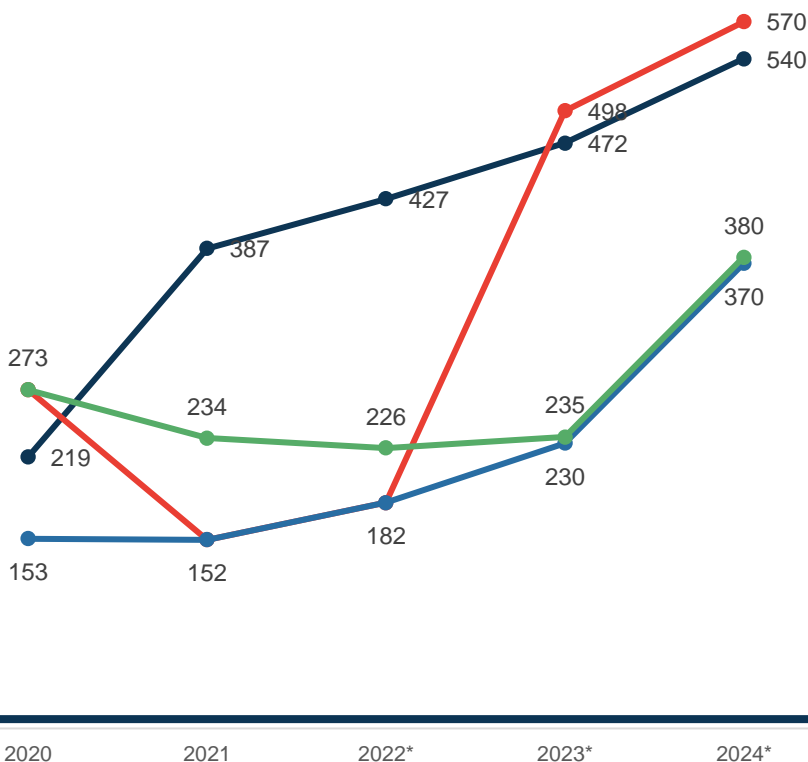
** Perubahan Target Top Up PNPB TA 2023 – Berkas Perkara dihitung Indikator Kinerja UKE I.

CAPAIAN DAN PROGNOSIS

INDIKATOR KINERJA UKE I

Rasio kasus total perkara pidana dan perdata sebesar 1:0,6714 merupakan target dalam RPJMN Direktur Jenderal PHLHK hingga tahun 2024, yaitu sebanyak 2045 kasus, dibandingkan dengan pencapaian Rencana Kerja sebanyak +1.373 kasus.

Prognosis jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya gap sebesar 195 kasus hingga mencapai target yang disepakati sebanyak 570 kasus. Prognosis saat ini mencapai 380 kasus dari usulan target 375 kasus di tahun 2024. Oleh karena itu, gap ini menjadi tantangan untuk dioptimalisasi.



* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

CAPAIAN DAN PROGNOSIS

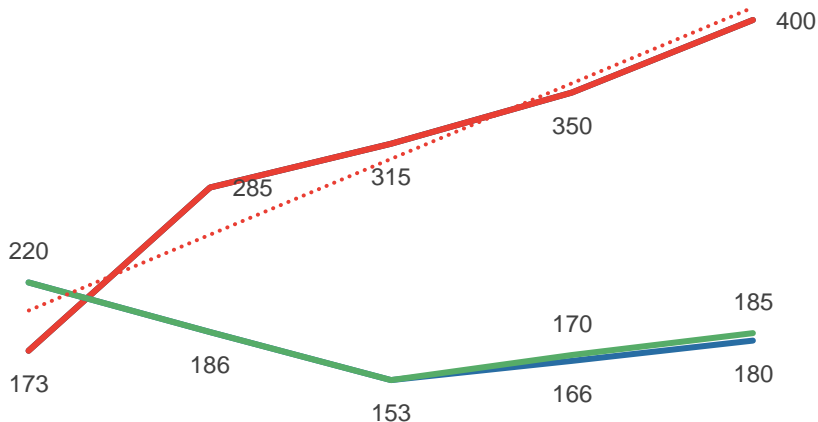
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Rasio kasus (P-21) sebesar 1:0,6714 mencerminkan perbandingan target indikator kinerja kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan terhadap total 2.045 perkara kasus (P-21) dalam dokumen RPJMN dan 1.675 perkara kasus (P-21) dalam dokumen Revisi RENSTRA Direktur Jenderal PHLHK hingga tahun 2024.

Prognosis menunjukkan adanya 1.373 perkara (P-21) pada tahun 2024 dari target total 1.112 perkara kasus (P-21). Oleh karena itu, terdapat gap sebesar 672 perkara (P-21) dengan RPJMN dan 302 perkara kasus (P-21) pada Renstra Revisi Ditjen HLHK yang perlu dioptimalisasi. Informasi lebih lanjut dapat dijabarkan di Bab III Rencana Kerja Ditjen PHLHK TA 2024. Maka, gap ini menjadi tantangan untuk dioptimalisasi.

RINCIAN OUTPUT : KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT : PENANGANAN PERKARA (QCE)



2020

2021

2022

2023*

2024*

— Target RPJMN 2020 s.d 2024
— Target Pidana P-21

— Target Renstra 2020 s.d 2024 Revisi
— Capaian Pidana P-21

* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

CAPAIAN DAN PROGNOSIS

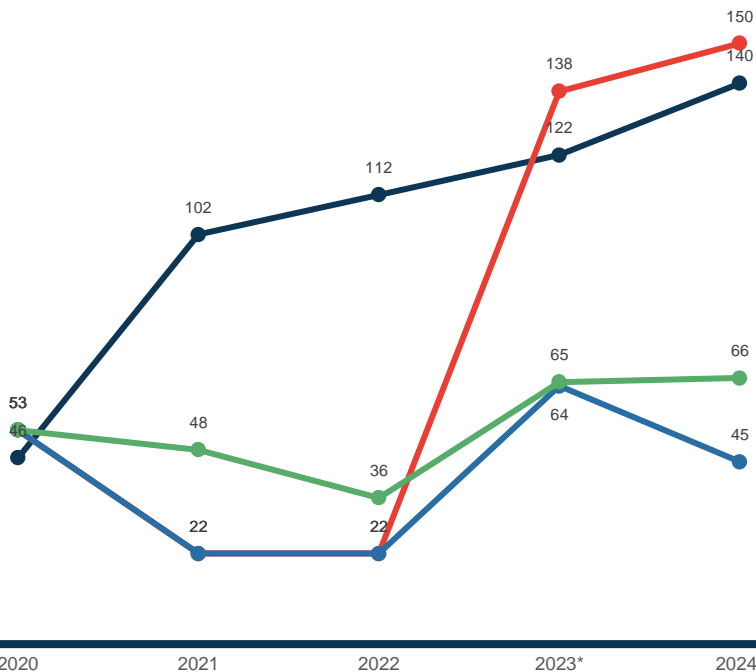
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Rasio perkara perdata sebesar 1:0,5134 mencerminkan perbandingan target indikator kinerja penanganan sengketa lingkungan hidup terhadap total 522 perkara perdata dalam dokumen RPJMN dan 385 perkara perdata pada dokumen Revisi RENSTRA Direktur Jenderal PHLHK hingga tahun 2024.

Prognosis menunjukkan adanya 268 perkara perdata hingga tahun 2024 dari target total 206 perkara perdata. Oleh karena itu, terdapat gap sebesar 254 perkara perdata dengan RPJMN dan 117 perkara perdata pada Renstra Revisi Ditjen PHLHK, yang perlu dioptimalisasi. Maka, GAP ini menjadi tantangan untuk dioptimalisasi.

RINCIAN OUTPUT : PENANGANAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT : PENANGANAN PERKARA (QCE)



* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

CAPAIAN DAN PROGNOISIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

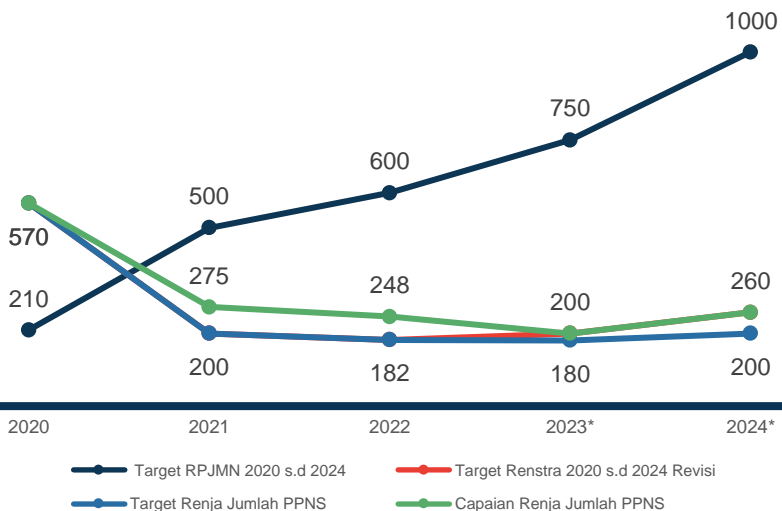
Rasio PPNS LHK sebesar 1:0,5075 mencerminkan perbandingan target indikator kinerja jumlah peningkatan kapasitas PPNS LHK terhadap total 3.060 orang dalam dokumen RPJMN dan 1.412 orang dalam dokumen Revisi RENSTRA Direktur Jenderal PHLHK hingga tahun 2024.

Prognosis menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1.553 orang hingga tahun 2024 dari target total 1.332 orang. Oleh karena itu, terdapat gap sebesar 1.507 orang dengan RPJMN, yang perlu dioptimalisasi. Maka, GAP ini menjadi tantangan untuk dioptimalisasi.

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024*
Target RPJMN 2020 s.d 2024	210	500	600	750	1000
Target Renstra 2020 s.d 2024 Revisi	570	200	182	200	260
Target Renja Jumlah PPNS	570	200	182	180	200
Capaian Renja Jumlah PPNS	570	275	248	200	260

RINCIAN OUTPUT : PENINGKATAN KAPASITAS PPNS LHK

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT : (DCE) PENINGKATAN KAPASITAS PPNS LHK

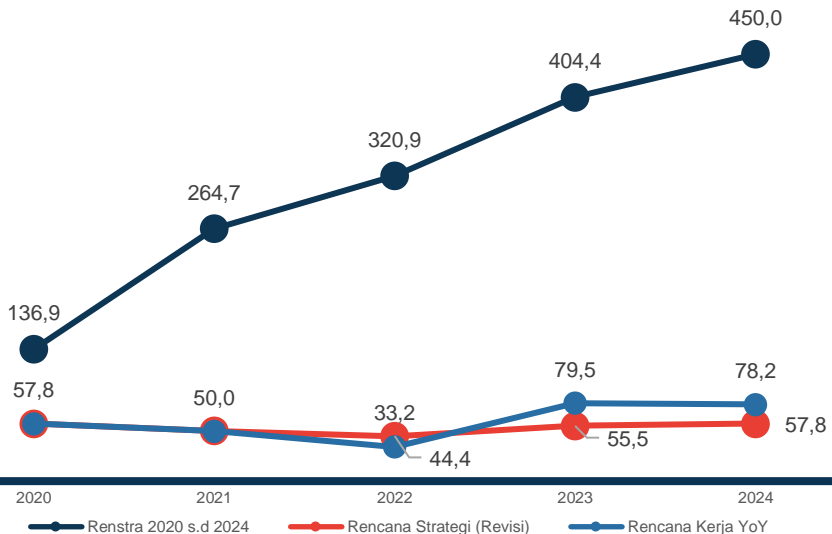


* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

TREN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Rasio alokasi anggaran sebesar 1:0,1908 mencerminkan indikasi pendanaan yang tercantum di RPJMN, dengan rata-rata pendanaan per tahun sebesar 315,4 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, 862 miliar Rupiah merupakan total anggaran rencana strategi, yang sudah mencakup anggaran peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan TA 2020 hingga 2024. Pagu total anggaran program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar ±301 miliar Rupiah tercantum dalam Rencana Kerja per tahun.

RPJMN 2020 s.d 2024	2020	2021	2022	2023	2024	Indikasi Pendanaan (Miliar Rp)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						1.577
Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024*	Alokasi Anggaran
Renstra 2020 s.d 2024	136,9	264,7	320,9	404,4	450,0	862
Renstra 2020 s.d 2024 (Revisi)	57,8	50,0	44,4	55,5	57,8	266
Rencana Kerja	59,8	50,0	33,2	79,5	78,2	301



* Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

CAPAIAN DAN PROGNOISIS

INDIKATOR KINERJA UKE I

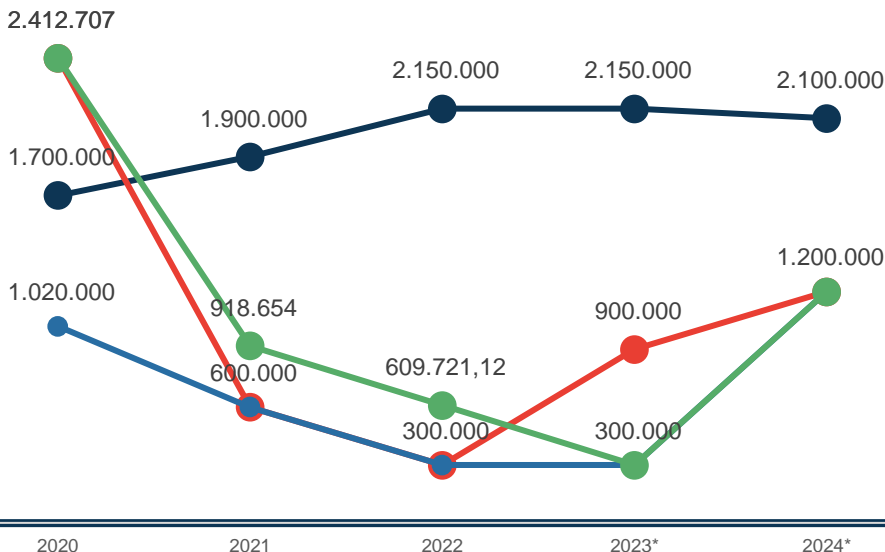
Total target luas hutan yang diamankan hingga tahun 2024 adalah sebanyak 10.000.000 hektar, sesuai dengan RPJMN dan RENSTRA Direktur Jenderal PHLHK. Namun, prognosis capaian total target luas hutan yang diamankan sampai dengan tahun 2024 menunjukkan adanya pencapaian sebesar +5.441.000 hektar, melebihi total target yang telah ditetapkan hingga tahun 2024 sebesar 3.420.000 hektar. Meskipun terdapat surplus, masih terdapat GAP yang menjadi tantangan untuk dioptimalisasi.

NAMA K/L : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PILAR : LINGKUNGAN

TUJUAN : KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG SEMAKIN TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

PROGRAM : PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN (PHB)



* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

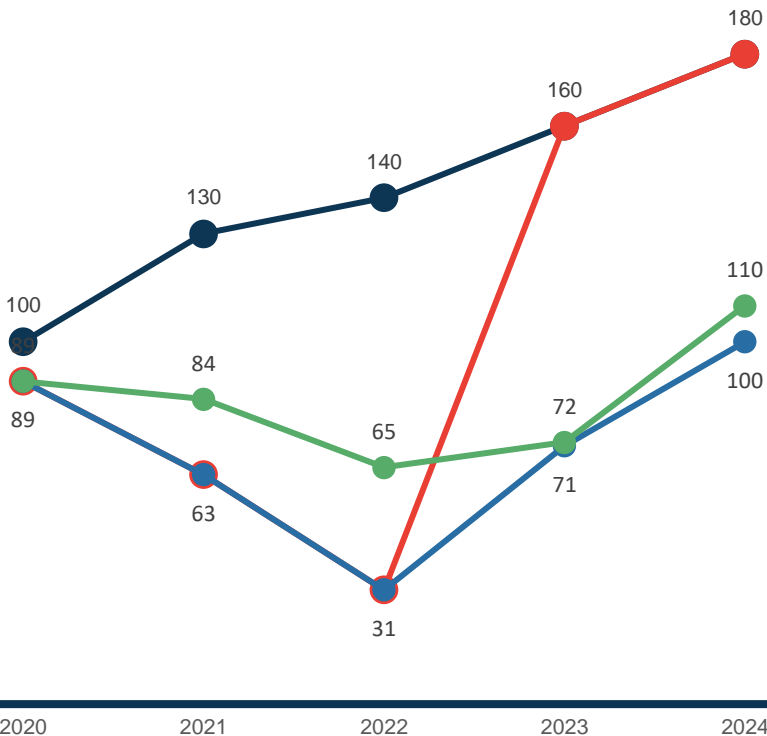
CAPAIAN DAN PROGNOISIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Rasio operasi pengamanan hutan sebesar 1:0,7294 mencerminkan perbandingan target indikator kinerja operasi pengamanan hutan terhadap total 548 operasi hingga tahun 2024. Namun, prognosis capaian kinerja total hingga tahun 2024 menunjukkan adanya pencapaian sebanyak 400 operasi dari target 334 operasi. Meskipun telah mencapai target, masih terdapat gap sebesar 148 operasi dengan target RPJMN 2020 s.d 2024. Maka, GAP ini menjadi tantangan untuk dioptimalisasi.

RINCIAN OUTPUT : OPERASI PENGAMANAN HUTAN

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT : OPERASI PENGAWASAN SUMBER DAYA ALAM (QH)



* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

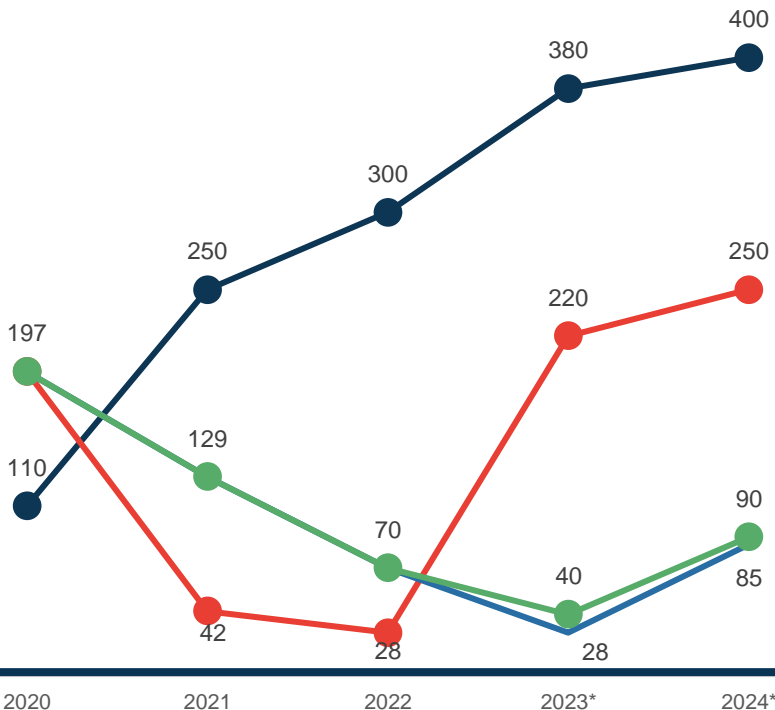
CAPAIAN DAN PROGNOISIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Rasio operasi peredaran hasil hutan ilegal sebesar 1:0,5115 mencerminkan perbandingan target indikator kinerja operasi illegal logging dan TSL (Tim Satuan Layanan) dengan total 1.029 operasi hingga tahun 2024. Namun, prognosis capaian kinerja total hingga tahun 2024 menunjukkan adanya pencapaian sebanyak 526 operasi dari target 509 operasi. Meskipun telah mencapai target, masih terdapat gap sebesar 503 operasi dengan target RPJMN 2020 s.d. 2024. Maka, gap ini menjadi tantangan untuk dioptimalisasi.

RINCIAN OUTPUT : OPERASI PEREDARAN HASIL HUTAN ILEGAL

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT : OPERASI PENGAWASAN SUMBER DAYA ALAM (QHD)



* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

CAPAIAN DAN PROGNOISIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

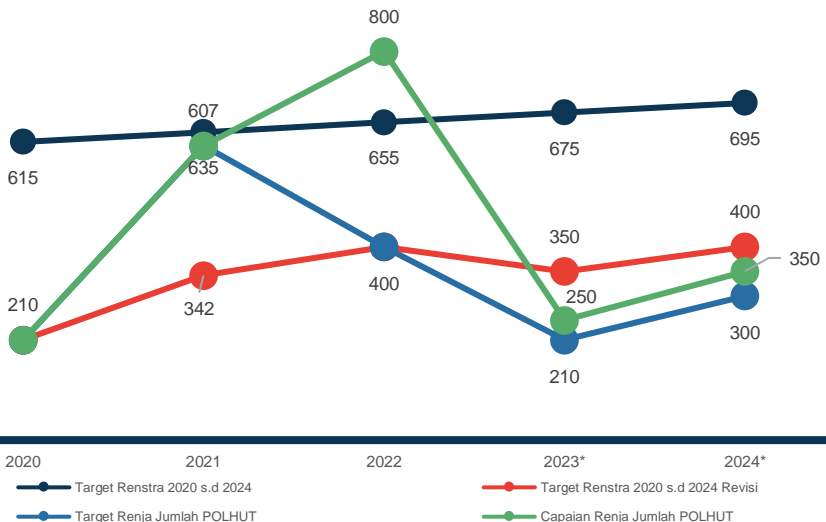
Rasio polisi kehutan sebesar 1:0,676 mencerminkan perbandingan target indikator kinerja jumlah peningkatan kapasitas polisi kehutan dengan total 1.029 orang dalam dokumen RPJMN dan 737 orang dalam dokumen Revisi Rencana Strategi Direktur Jenderal PHLHK hingga tahun 2024.

Prognosis menunjukkan adanya peningkatan total hingga tahun 2024 sebanyak 2.217 orang dari target total 1.727 orang. Meskipun telah mencapai target, masih terdapat gap sebesar 1.058 orang yang perlu dioptimalisasi.

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024*
Target Renstra 2020 s.d 2024	615	635	655	675	695
Target Renstra 2020 s.d 2024 Revisi	210	342	400	350	400
Target Renja Jumlah POLHUT	210	607	400	210	300
Capaian Renja Jumlah POLHUT	210	607	804	250	350

RINCIAN OUTPUT : PENINGKATAN KAPASITAS POLISI KEHUTANAN

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT : PELATIHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DCE)



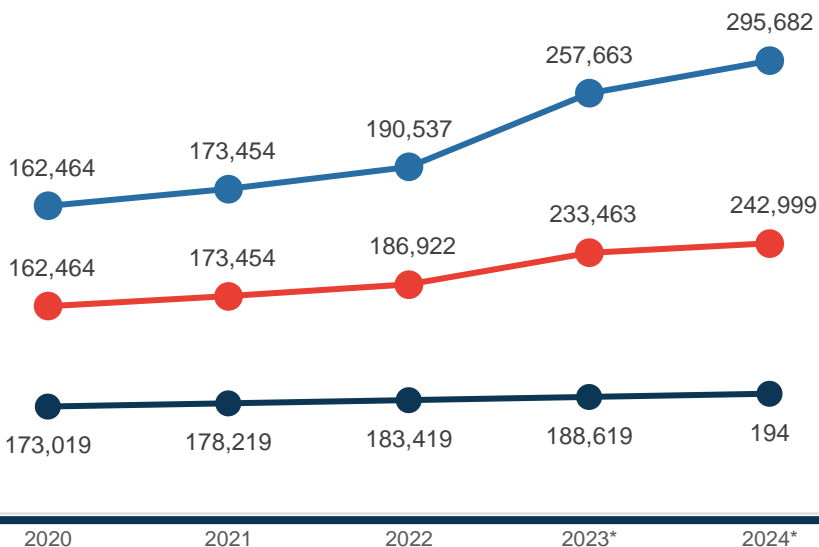
* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

TREN ALOKASI ANGGARAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Total alokasi anggaran sebesar ±1,079 triliun Rupiah merupakan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategi Perubahan Ditjen PHLHK pada periode 2020 hingga 2022, beserta prognosis anggaran untuk tahun 2023 dan 2024. Program Dukungan Manajemen ini tidak termasuk dalam Anggaran Prioritas Nasional RPJMN. Penambahan anggaran dalam Program Dukungan Manajemen, Ditjen PHLHK, memiliki dampak signifikan terhadap perubahan paradigma pemerintah terkait kebijakan SDM Aparatur Negeri Sipil dalam tahun berjalan.

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024*	Total Anggaran
Renstra 2020 s.d 2024	173,019	178,219	183,419	188,619	194	917,098
Renstra 2020 s.d 2024 REVISI	162,464	173,454	186,922	233,463	242,999	999,302
Rencana Kerja*	162,464	173,454	190,537	257,663	295,682	1.079,800



* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

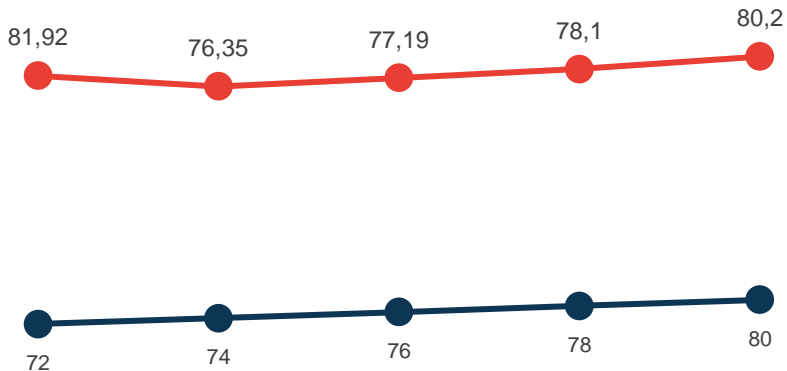
CAPAIAN DAN PROGNOISIS

INDIKATOR KINERJA UKE I

Target indikator kinerja untuk UKE I Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga tahun 2024 adalah >80 poin. Tidak terdapat perubahan dalam Rencana Strategi dan Rencana Kerja di tahun berjalan terkait indikator kinerja UKE I dan indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen. Prognosis di tahun 2023 didasarkan pada laporan hasil evaluasi tahun 2022, sehingga dapat mendukung pencapaian target di tahun 2023 pada saat ini.

Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor S.429 Tahun 2023 tanggal 3 Desember 2023 tentang Pencermatan Konsep Perjanjian Kinerja KLHK Tahun 2024 berusaha menginternalisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Indikator Kinerja UKE I	2020	2021	2022	2023*	2024*
Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	72	74	76	78	80
Capaian Kinerja Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	81,92	76,35	77,19	78,1	80,2
Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHLHK	--	--	--	--	98.12
Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHLHK	--	--	--	--	98.15



2020 2021 2022 2023* 2024*

● Nilai SAKIP Ditjen PHLHK ● Capaian dan Prognosis Kinerja Nilai SAKIP Ditjen PHLHK

* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

CAPAIAN DAN PROGNOISIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Target indikator kinerja SAKIP untuk UKE I Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga tahun 2024 adalah >80 poin. Tidak terdapat perubahan signifikan dalam Rencana Strategi 2020 hingga 2024 dan Rencana Kerja di tahun berjalan terkait indikator kinerja tersebut.

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023*	2024*
Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum LHK	72	74	76	78	80
Level maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	3	3	4	4
Laporan keuangan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	1	1	1

RINCIAN OUTPUT DAN KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT DUKUNGAN MANAJEMEN

Target rincian output (klasifikasi rincian output) dalam kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya melibatkan 6 layanan. Layanan ini diselenggarakan di 1 (satu) Kantor Pusat Ditjen PHLHK dan 5 (lima) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pencapaian dari layanan ini diharapkan dapat mendukung penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) UKE I pada Program Dukungan Manajemen Ditjen PHLHK dan nilai SAKIP Kementerian LHK secara keseluruhan.

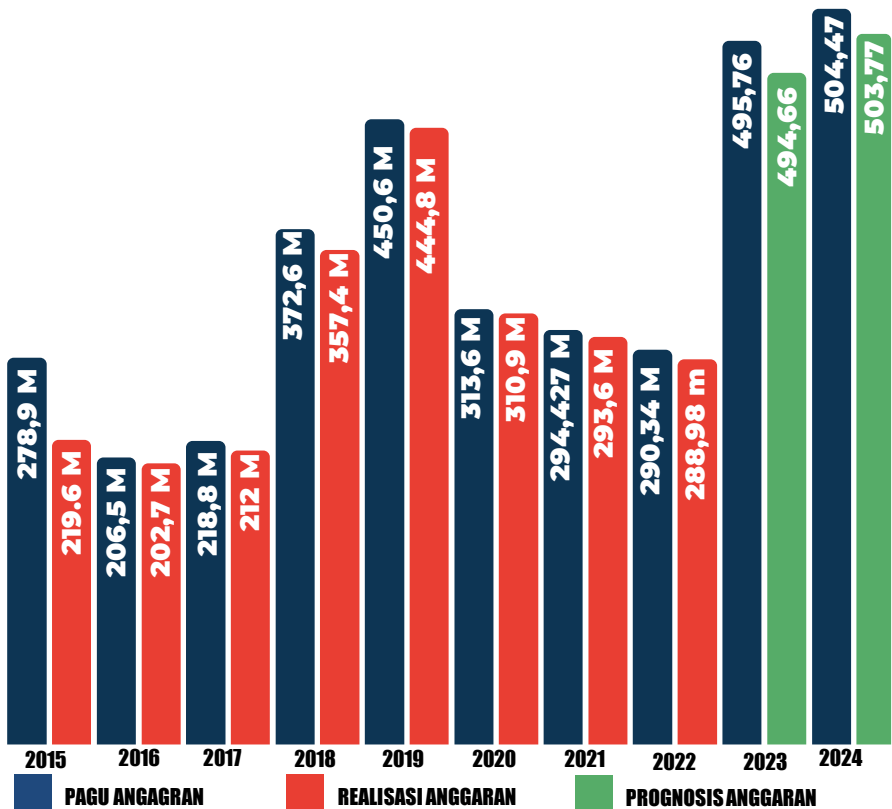
Target Rencana Strategi TA 2020 s.d 2024 dan/atau Perubahan, Rencana Kerja	2020	2021	2022	2023*	2024*
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal					
962 - Layanan Umum	6	6	6	6	6
994 - Layanan Perkantoran	6	6	6	6	6
EBB - Layanan Sarana Prasarana Internal					
951 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6	6	6	6	6

* Prognosis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

B. CAPAIAN DAN PROGNOSIS ANGGARAN

Tren Pagu Anggaran mengalami peningkatan akibat pengaruh signifikan kebijakan pemerintah seiring dengan endemi Covid-19 pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023, terjadi penambahan anggaran Top Up PNBP dari Pagu Alokasi Anggaran awal sebesar Rp 354,211 miliar menjadi Rp 495,76 miliar. Perlu dicatat bahwa jumlah ini belum termasuk kebijakan *Automatic Adjustment* di dalamnya.

Dilihat dari tren realisasi anggaran selama 8 (delapan) tahun Direktorat Jenderal PHLHK, terdapat nilai rata-rata realisasi anggaran sebesar 95,85% per tahun. Namun, mengingat tingginya komitmen realisasi anggaran di tahun 2023 dan tahun 2024 yang ditetapkan sebesar minimal 99,75%, diharapkan dapat memacu peningkatan realisasi anggaran. Prognosis realisasi di tahun 2023 diharapkan mencapai 99,78%, sementara di tahun 2024 minimal sebesar 99,85%. Perlu diperhatikan bahwa besarnya Pagu Alokasi Anggaran akan dipengaruhi oleh kebijakan perubahan anggaran yang diterapkan pada tahun 2024 di tahun berjalan.



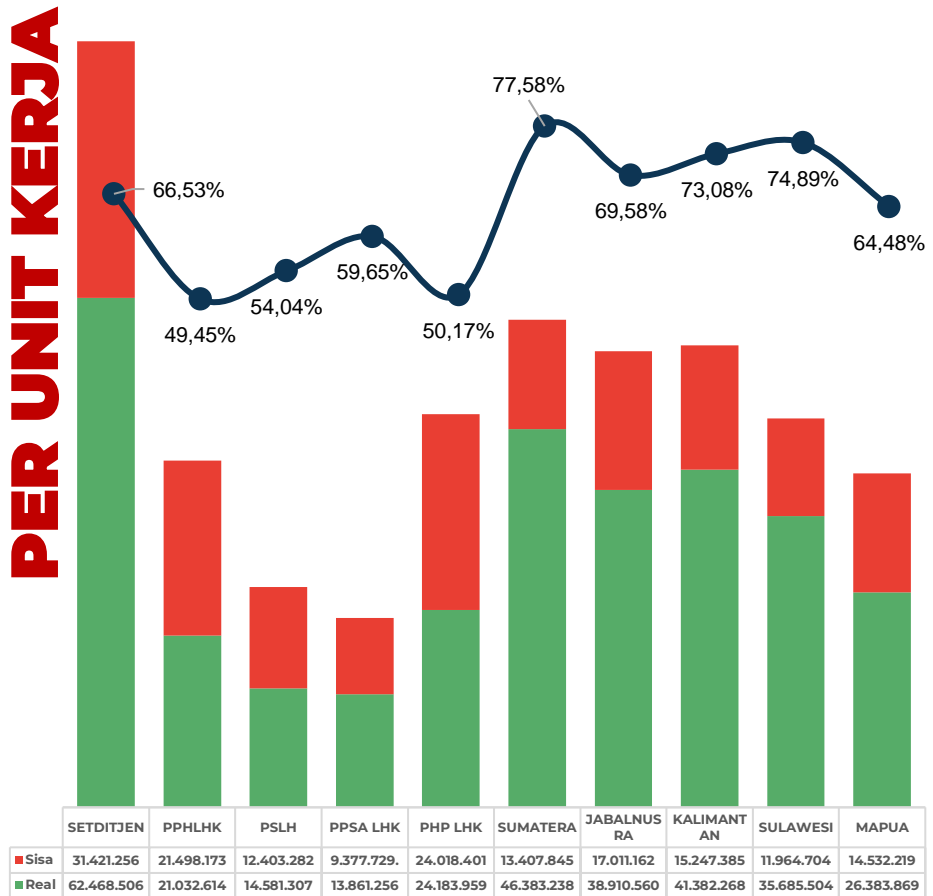
PENYESUAIAN ANGGARAN TAHUN 2023



PROGNOSIS ANGGARAN TAHUN 2023

PAGU 495.755.247	REALISASI 324.873.086	SISA ANGGARAN 170.882.160	PROGNOSIS SERAPAN 495.259.492	% PROGNOSIS SERAPAN 99,90%
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------

*Data Per 6 November 2023

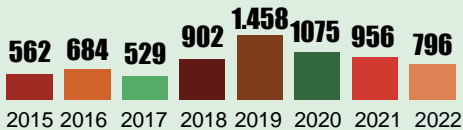


Serapan anggaran Ditjen Gakkum LHK diprognoiskan mencapai ±99,90% dari total pagu anggaran. Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran yang baru mencapai sebesar 65,45% hingga tanggal 6 November 2023, Ditjen Gakkum LHK melakukan revisi anggaran antar output. Langkah ini diambil untuk merealokasikan anggaran ke output yang memiliki urgensi lebih tinggi agar dapat diselesaikan dengan lebih efisien.

C. KERJA GAKKUM KLHK TA 2020 s.d 2022

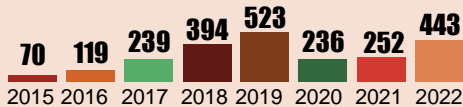
6.962

Penanganan Pengaduan



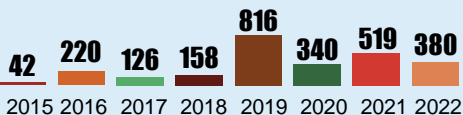
2.276

Pengawasan Perusahaan



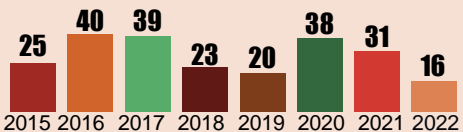
2.601

Sanksi Administratif



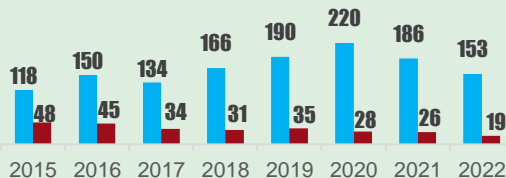
232

Kesepakatan di Luar Pengadilan



1.317

P-21



267

Fasilitasi Polisi & Jaksa

1.891

Operasi



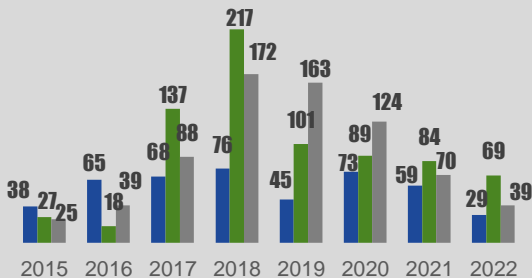
453 TSL



742 Perambahan



72 Pembalakan Liar



31

Perusahaan

Gugatan Perdata

GUGATAN PERDATA

31 Gugatan

***20,79** IDR Triliun Inkracht

21 Inkracht

*Potensi Penerimaan PNBPN

*Data Realisasi per 31 Desember 2022.

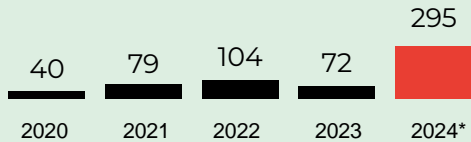
PROGNOSIS TARGET TAHUN 2023

Rincian Output	Klasifikasi Rincian Output	Target Rencana Kerja TA 2023			
		Awal	Top Up PNBP	Pergeseran PNBP	Prognosis 2023
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	(QHB) Operasi Bidang Keamanan	51	73	73	74
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	(QHB) Operasi Bidang Keamanan	25	28	28	50
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	210	230	230	425
001-Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	750	1.045	1.048	1050
002- Sanksi Administratif Badan Usaha pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	50	50	50	50
001-PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	220	420	420	450
001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	QCE-Penanganan Perkara	160	160	166	168
002-Berkas Kawasan Hutan	QCE-Penanganan Perkara	60	250	250	255
001- Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	QCE-Penanganan Perkara	30	64	64	65
001-PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	180	230	230	235
962 - Layanan Umum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	6	6	6	6
994- Layanan Perkantoran	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	6	6	6	6
951 - Layanan Sarana Internal	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1

D. MONITORING DAN EVALUASI ROAD MAP PENGARUSUTAMAAN GENDER 2020 s.d 2024

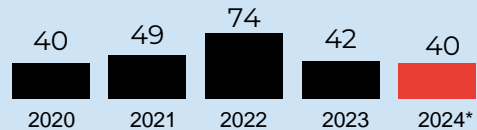
500

Orang mendapat Sosialisasi Pengetahuan Tentang Konsep Gender Dan Penghapusan Stereotip Gender



100

Staff Ditjen PHLHK terlatih untuk menjadi fasilitator gender dan anggota SUB POKJA PUG



3 Modul dan Kurikulum Bahan Ajar (Konsep Gender, Analisis Gender, dan PPRG) bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sarana Prasarana lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. **Standar dan Prosedur pengadaan fasilitas dan peralatan** yang responsif gender terhadap kebutuhan staf perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan gender Ditjen PHLHK
2. Adanya **peralatan kerja yang responsif gender** untuk staf Ditjen PHLHK.
3. Adanya penyesuaian sarana prasarana ditingkat nasional dan daerah berdasarkan pertimbangan dan pemenuhan kebutuhan yang responsif gender.
4. Adanya kebijakan dan peraturan yang dikembangkan dalam kerangka yang responsif gender.
5. Pengembang Sistem dan Mekanisme Pengaduan yang Responsif Gender



BAB III
RENCANA KERJA 2024
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM LHK
DALAM Mendukung PRIORITY NASIONAL

SASARAN EKONOMI MAKRO RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

73,99 – 74,02

Indeks Pembangunan Manusia

0,375 – 0,378

Rasio Gini (Nilai)

5,0% – 5,7

Tingkat Pengangguran
Terbuka

27,27

Penurunan Emisi GRK

(%)

5,3 s.d 5,7

Pertumbuhan Ekonomi

(%)

6,5 – 7,5

Tingkat Kemiskinan

(%)



Arah Kebijakan Strategi Nasional



MISI PRESIDEN ARAHAN PRESIDEN 7 AGENDA PRESIDEN

- 1 | PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA
- 2 | STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING
- 3 | PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN
- 4 | MENCAPAI LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN
- 5 | KEMAJUAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN BANGSA
- 6 | PENEGAKAN SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA
- 7 | PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA
- 8 | PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN TERPERCAYA
- 9 | SINERGI PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

- 1 | PEMBANGUNAN SDM
- 2 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
- 3 | PENYEDERHANAAN REGULASI
- 4 | PENYEDERHANAAN BIROKRASI
- 5 | TRANSFORMASI EKONOMI

- MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN
- MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESEJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
- MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
- REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
- MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM
- MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

(1) PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

- Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial ekonomi (Resosek untuk Peningkatan Akurasi Program Perlindungan Sosial).
- Konvergensi pelaksanaan Program-Program perlindungan social.
- Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan Kesejahteraan petani dan nelayan.
- Peningkatan kualitas konsumsi pangan.

(3) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

- Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan.
- Reformasi sistem perlindungan social.
- Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta.
- Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas.
- Meningkatkan kualitas anak, Perempuan dan pemuda.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

(5) REVITALISASI INDUSTRI DAN PENGUATAN RISET TERAPAN

- Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok.
- Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.

(7) PENGUATAN DAYA SAING USAHA

- Meningkatkan kualitas teknologi informasi.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi.
- Mewujudkan investasi yang ramah dan kondusif.
- Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi.
- Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

(2) PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN TRANSISI ENERGI

- Melaksanakan Pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir).
- Konservasi lahan produktif.
- Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan.
- Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.

(4) PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS

- Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh.
- Meningkatkan ketahanan air tingkat wilayah Sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air dan Hemat Air.
- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda Pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan disetiap wilayah.
- Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi.
- Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP).

(6) PERCEPATAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

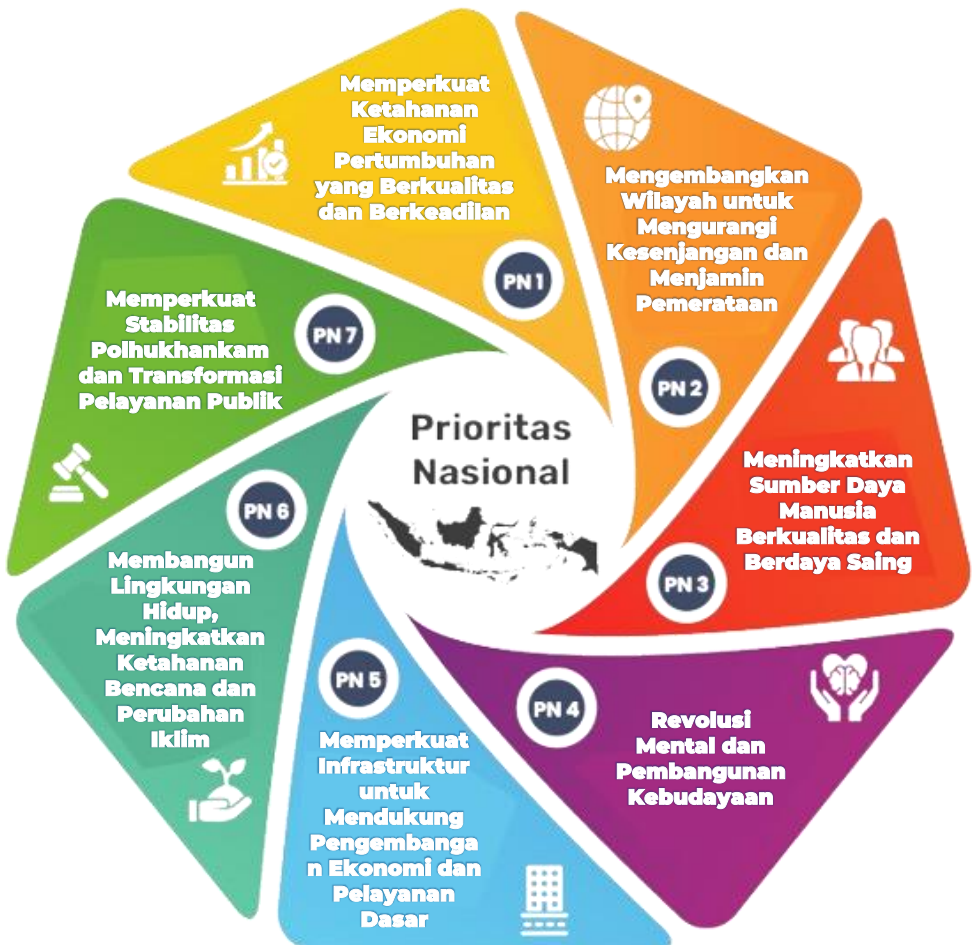
- Membangun Gedung pemerintahan dan hunian;
- Membangun infrastruktur utama.

(8) PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan.
- Mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
- Mendukung penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri.

PRIORITAS NASIONAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 disampaikan dalam infografis di bawah ini.



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, RKP 2024;

TEMA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Tema Pembangunan LHK

"Geliat Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup di Seluruh Provinsi Seiring Pertumbuhan Ekonomi yang Semakin Merata".

INTERNALISASI PRIORITAS NASIONAL KEDALAM PEMBANGUNAN LHK TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 bertema “ **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** ” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) , dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) mendukung pada 4 (empat) PN yaitu :

- (PN-1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- (PN-2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- (PN-3) meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- dan (PN-6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Selanjutnya, 4 (empat) PN tersebut diinternalisasi ke dalam pembangunan LHK sebagai berikut.

1

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

- Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung factor pertumbuhan ekonomi
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industry pengolahan dan destinasi wisata

3

MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

- Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan tanah obyek reforma agrarian, perhutanan social, peningkatan kapasitas Masyarakat dan Pendidikan vokasi

2

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESEJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

- Membantu Menyiapkan Ibu Kota Nusantara

6

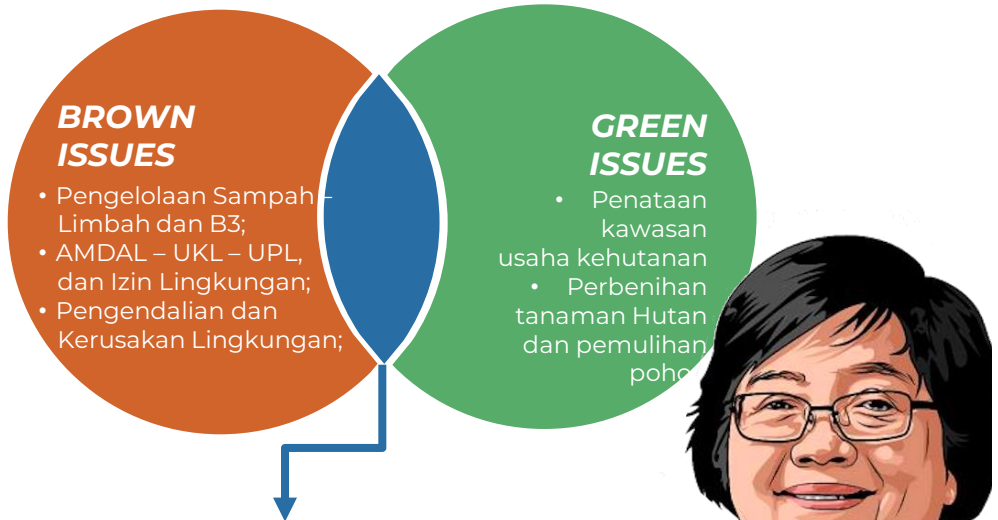
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan ”, pada Prioritas Nasional 6 (PN-6) **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**, diinternalisasi ke dalam kebijakan Ditjen Gakkum KLHK sebagai berikut.

Rencana Strategi KLHK TA 2020 s.d 2024

Isu Lingkungan Hidup dan Kehutanan



IDENTIFIKASI & PERTAUTAN ISU

PENEGAKAN HUKUM	KONSERVASI BIODIVERSITAS
PENGLOLAAN DAS	EKONOMI LINGKUNGAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
PERUBAHAN IKLIM	



Siti Nurbaya
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Hints Program

1. LOKASI SUMBERDAYA HUTAN UNTUK PEMERATAAN EKONOMI

2. PENGENDALIAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN/LAHAN

3. KONSERVASI DAN PEMELIHARAAN BIODIVERSITY DAN BIOSFER

4. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN

5. PENGENDALIAN KEJAHATAN LINGKUNGAN

6. KEMITRAAN DAN KETERLIBATAN STAKEHOLDERS DALAM RANTAI USAHA HUTAN DAN SAMPAH

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024



PRIORITAS NASIONAL 6 (ENAM) :
Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim

Sasaran Prioritas Nasional 6 (Enam) :

- Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Perbaikan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim dengan perbaikan pada penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap PDB.
- Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline dengan perbaikan pada (a) Persentase penurunan Emisi GRK-Kumulatif, (b) Persentase penurunan GRK-Tahunan, dan (c) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK.



Dukungan Ditjen Gakkum KLHK
Mendukung Prioritas Nasional 6 (Enam)
dengan Total Anggaran Rp. 150,309 M

Tagging Mitigasi Perubahan Iklim
 Rp 192,732 M

Tagging Anggaran Responsif
 Gender Rp 2,000 Milliar



Peningkatan kualitas
 SDM :
 Kesehatan dan
 Pendidikan



Penanggulangan
 Pengangguran Disertai
 Dengan Peningkatan
 Decent Job



Mendorong Pemulihan
 Dunia Usaha



Pembangunan Rendah
 Karbon dan Transisi
 Energi (Respon Terhadap
 Perubahan Iklim)



Pengembangan
 Ibu Kota
 Nusantara

Peningkatan
 Kapasitas
 Aparat Penegak
 Hukum LHK

Pelaksanaan
 Penegakan
 Hukum LHK
 untuk
 memastikan
 masyarakat
 sekitar hutan
 tidak kehilangan
 haknya

Prinsip
*Restorative
 Justice* dengan
 Penerapan
 Sanksi
 Administratif
 pada perusahaan
 sebagai
 pelaksanaan
 mandat UUCK

Penegakan
 Hukum LHK
 sebagai bentuk
 kontribusi pada
 FOLU Net Sink
 2030

Penguatan
 Penegakan
 Hukum LHK di
 sekitar kawasan
 IKN dengan
 pelaksanaan
 operasi,
 pengawasan dan
 penindakan



**PRIORITAS NASIONAL 6 (ENAM) :
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP,
MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA
DAN PERUBAHAN IKLIM**

**Program
Prioritas 3 :
Pembangunan
Rendah
Karbon**



**Program
Prioritas 2 :
Peningkatan
Ketahanan
Bencana dan
Iklim**

**Kegiatan Prioritas 1:
Pencegahan Pencemaran
dan Kerusakan Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup**

**Kegiatan Prioritas 3:
Pemulihan Pencemaran
dan Kerusakan Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup**

**Program Prioritas 1:
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup**

**Kegiatan Prioritas 2:
Penanggulangan
Pencemaran dan
Kerusakan Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup**

**Kegiatan Prioritas 4: Penguatan Kelembagaan
dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup**

Pro-PN:

- 1) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah
- 2) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 3) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Program Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Bidang	Anggaran Rp. Juta
Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01. Persentase Pemegang Izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	70%	PHLHK	312.764
		02. Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup dan kehutanan yang ditangani	640 Kasus	PHLHK	
		03. Jumlah Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	2.100.000 Hektar	PHLHK	
		04. Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	8 Daerah	NON PHLHK	

Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Bidang	Anggaran Rp. Juta
Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01- Terlaksananya Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01. Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan bidang LHK	1.450 Badan Usaha	PHLHK	167.292,1
		02. Jumlah Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1 Sistem	NON PHLHK	
		03. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	430 Operasi	PHLHK	
		04. Jumlah Layanan Permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	240 Layanan	NON PHLHK	

Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Bidang	Anggaran Rp. Juta
Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01- Terlaksananya Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata dan Mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01. Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap	350 Perkara	PHLHK	94.233,8
		02. Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan	110 Perkara	PHLHK	

Strategi Program:

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PILAR LINGKUNGAN : KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG SEMAKIN TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

SASARAN STRATEGIS 1 (T1. S1)

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (IKU T1.S1)

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

1. PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN PROGRAM 1 (T1.S1.1.9)

MENINGKATNYA BUDAYA KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LHK

INDIKATOR PROGRAM 1 (T1.S1.1.9)

PERSENTASE PEMEGANG IZIN YANG TAAT TERHADAP PERATURAN TERKAIT BIDANG LHK

SASARAN PROGRAM 2 (T1.S1.1.10)

TERSELESAIKANNYA KASUS PENEGAKAN HUKUM BIDANG LHK

INDIKATOR PROGRAM 2 (T1.S1.1.9)

JUMLAH KASUS PIDANA DAN PERDATA YANG DITANGANI

SASARAN STRATEGIS 4 (T1. S4)

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 (IKU T1.S4)

MENURUNNYA LAJU PENYUSUTAN HUTAN

LAJU DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN

3. PROGRAM HUTAN BERKELANJUTAN

SASARAN PROGRAM 3 (T1.S4.1.4)

MENINGKATNYA PENGAMANAN HUTAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN

INDIKATOR PROGRAM 3 (T1.S4.1.4)

LUAS HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN

PILAR TATA KELOLA : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, RESPONSIF DAN BERPELAYANAN PRIMA

SASARAN STRATEGIS 13 (T4. S2)

INDIKATOR KINERJA UTAMA 13 (T4. S2)

MENINGKATNYA BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK YANG *AGILE*, EFEKTIF DAN EFISIEN

NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI

5. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN PROGRAM 4 (T4.S2.1.4)

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KLHK

INDIKATOR PROGRAM 4 (T4.S2.1.4)

NILAI SAKIP

INDIKATOR PROGRAM *

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)

Indikator Kinerja Unit Kegiatan Eselon I (UKE I)

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.



1.200.000 HA

Hutan Diamankan dari
Gangguan dan Ancaman



225 KASUS

Pidana dan
Perdata yang
Ditangani



53 %

Ketaatan Usaha dan/atau
Kegiatan terhadap
Peraturan Perundang-
undangan Bidang LHK



80 POIN

Nilai SAKIP Ditjen
Penegakan Hukum LHK

98,12 POIN

Nilai Kinerja Anggaran
(NKA) Ditjen Penegakan
Hukum LHK

INDIKATOR KINERJA

TARGET
RENSTRA

TARGET
RENJA

ANGGARAN
RENSTRA

ANGGARAN
RENJA

1. PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

**PERSENTASE PEMEGANG IZIN
YANG TAAH TERHADAP
PERATURAN
TERKAIT BIDANG LHK**

70 Persen

53 Persen

44.559.861

32.750.000

**JUMLAH KASUS PIDANA DAN
PERDATA
YANG DITANGANI**

500 Kasus

225 Kasus

77.609.719

92.154.694

3. PROGRAM HUTAN BERKELANJUTAN

**LUAS HUTAN YANG
DIAMANKAN
DARI GANGGUAN DAN
ANCAMAN**

1.200.000
Hektar

1.200.000
Hektar

57.771.220

78.227.339

5. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

**NILAI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)**

80 Poin

80 Poin

242.998.698

301.339.685

**NILAI KINERJA ANGGARAN
(NKA)**

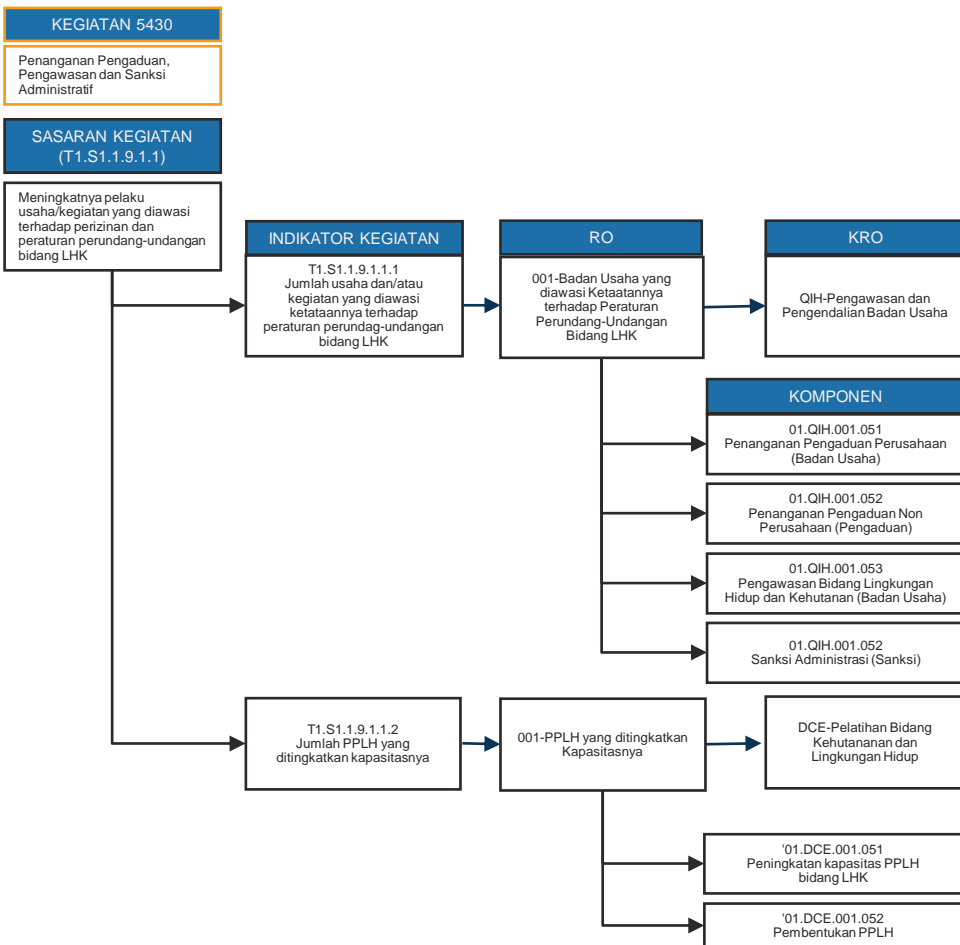
--

98,12 Poin

Cascading Kinerja 2024

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN STRATEGIS 1 (T1.S1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (IKU T1.S1)	TARGET
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74 Poin
SASARAN UKE I 1 (T1.S1.1.9)	INDIKATOR UKE I 1 (T1.S1.1.9)	TARGET UKE I 1
Meningkatnya budaya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	53 %



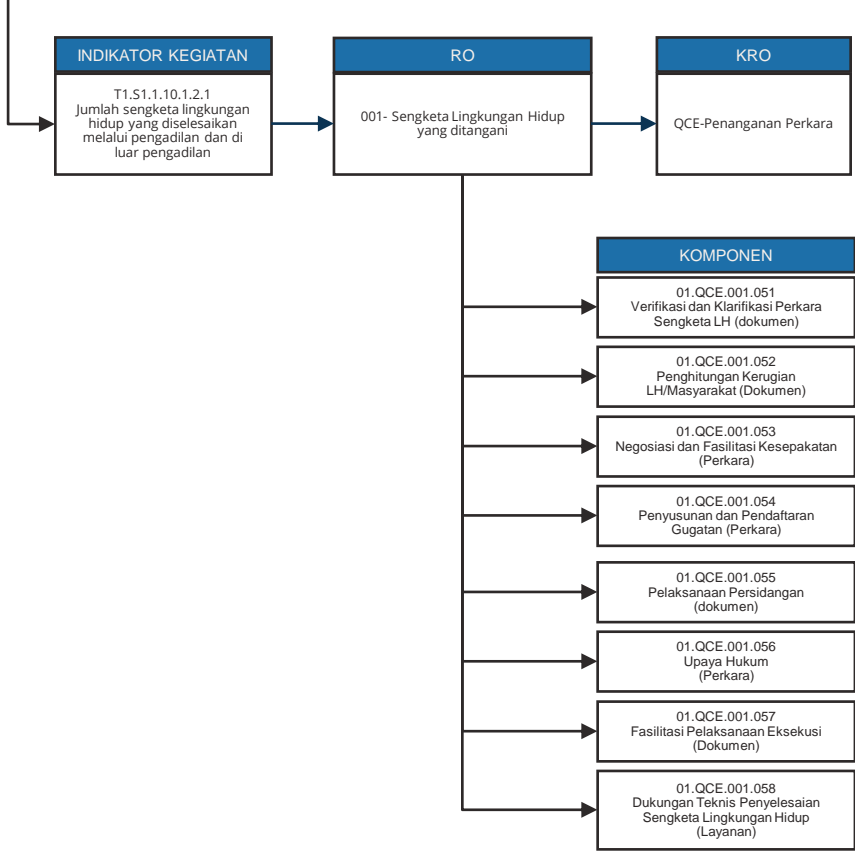
SASARAN STRATEGIS 1 (T1.S1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (IKU T1.S1)	TARGET
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74 Poin
SASARAN UKE I 2 (T1.S1.1.10)	INDIKATOR UKE I 2 (T1.S1.1.10)	TARGET UKE I 2
Terselesainya kasus penegakan hukum bidang LHK	Jumlah kasus pidana dan perdata yang ditangani	225 Kasus

KEGIATAN 5429

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

SASARAN KEGIATAN (T1.S1.1.10.1.2)

Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan



SASARAN STRATEGIS 1 (T1.S1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (IKU T1.S1)	TARGET
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74 Poin

SASARAN UKE I 2 (T1.S1.1.10)	INDIKATOR UKE I 2 (T1.S1.1.10)	TARGET UKE I 2
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang LHK	Jumlah kasus pidana dan perdata yang ditangani	225 Kasus

KEGIATAN 5431

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN KEGIATAN (T1.S1.1.10.1.1)

Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21

INDIKATOR KEGIATAN
T1.S1.1.10.1.1.1
Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap

RO
001-Kasus Tindak Pidana LHK P21

KRO
QCE-Penganganan Perkara

KOMPONEN

- 01.QCE.001.051 Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK (Dokumen)
- 01.QCE.001.052 Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK (Perkara)
- 01.QCE.001.053 Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK (Laporan)
- 01.QCE.001.054 Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (Kegiatan)

T1.S1.1.10.1.1.3
Jumlah Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan

002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan

QCE-Penganganan Perkara

- 01.QCE.002.051 Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK (Dokumen)
- 01.QCE.002.052 Penyusunan penetapan denda administratif (Perkara)
- 01.QCE.001.053 Verifikasi lapangan atas keataan terhadap penerapan denda administratif (Dokumen)

T1.S1.1.10.1.1.2
Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya

001-PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya

DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 01.DCE.001.051 Peningkatan PPNS LHK
- 01.DCE.001.052 Pembentukan PPNS LHK

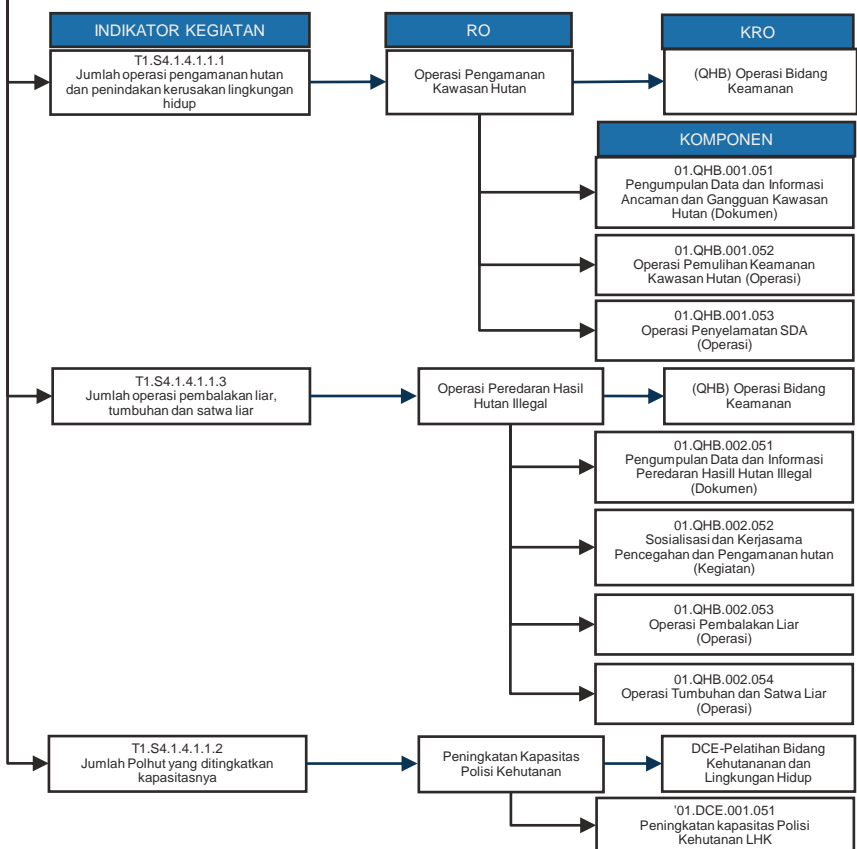
SASARAN STRATEGIS 1 (T1.S4)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (IKU T4.S1)	TARGET
Menurunnya laju penyusutan hutan	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	0,2 Juta Hektar
SASARAN UKE I 1 (T1.S1.1.9)	INDIKATOR UKE I 1 (T1.S1.1.9)	TARGET UKE I 1
Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman	Luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan hutan, serta perusakan lingkungan	1.200.000 Hektar

KEGIATAN 5428

Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN KEGIATAN (T1.S4.1.4.1.1)

Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan



SASARAN STRATEGIS 13 (T4.S2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 13 (IKU T4.S2.1)	TARGET
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Nilai kinerja reformasi birokrasi	85 Poin
SASARAN UKE I 4 (T4.S2.1.1)	INDIKATOR UKE I 4 (T4.S2.1.1.1)	TARGET UKE I 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80 Poin
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	98,12 Poin

KEGIATAN 5427

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

SASARAN KEGIATAN (T4.S2.1.1.1.9)		RO	KRO	KOMPONEN
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		962-Layanan Umum	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	01.EBA.962.051 Layanan PEHKT
				01.EBA.962.052 Layanan KKOTL
INDIKATOR KEGIATAN	TARGET			01.EBA.962.053 Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tusi Unit
T4.S2.1.1.1.9.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80 Poin			01.EBA.962.054 Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja
T4.S2.1.1.1.9.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel	1 Laporan	994-Layanan Perkantoran		01.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan
T4.S2.1.1.1.9.2 Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Level			01.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		951-Layanan Sarana Internal	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	051 - Pengadaan Kendaraan Bermotor (Unit)
				052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Paket)
				053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Paket)
				054 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (paket)
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	98,12 Poin			

RENCANA KERJA TAHUN 2024

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEGIATAN	KRO	RO	VOL	PAGU ('000)	TAGGING
Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	100 Operasi	39.570.800	Mitigasi Perubahan Iklim
	DCE-Pelatihan Bidang Ihk	Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	80 Operasi	35.656.539	Mitigasi Perubahan Iklim\
	DCE-Pelatihan Bidang Ihk	Polisi Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya	300 Orang	3.000.000	Mitigasi Perubahan Iklim

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI LHK

KEGIATAN	KRO	RO	VOL	PAGU ('000)	TAGGING
Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	QIH – Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan Usaha yang diawasi ketaatannya terhadap PUU bidang LHK	800 Badan Usaha	30.750.000	Mitigasi Perubahan Iklim
	DCE-Pelatihan Bidang LHK	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	300 Orang	2.000.000	Mitigasi Perubahan Iklim

DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	QCE – Penanganan Perkara	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	45 Perkara	17.240.000	Mitigasi Perubahan Iklim
--	--------------------------	--	------------	------------	--------------------------

DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA LHK

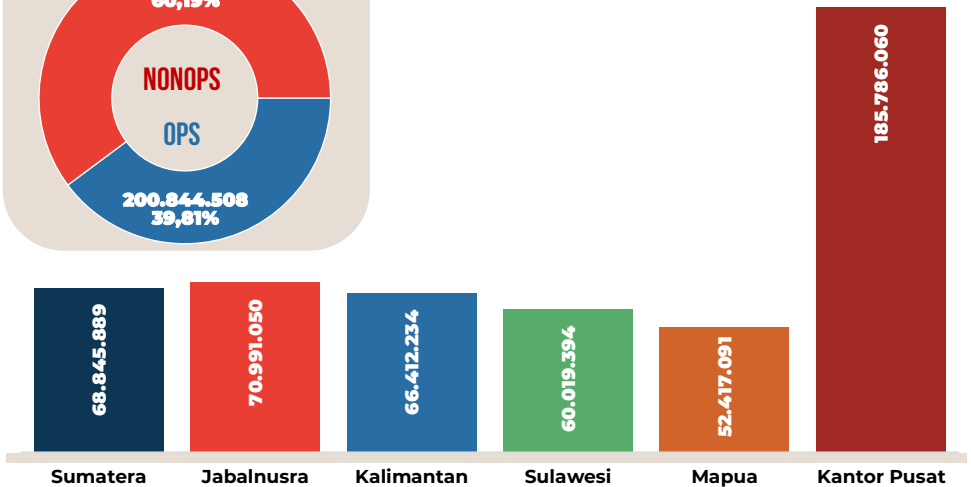
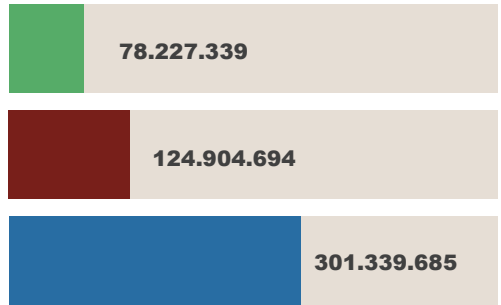
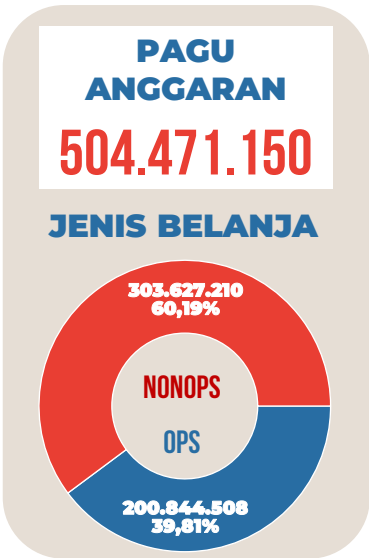
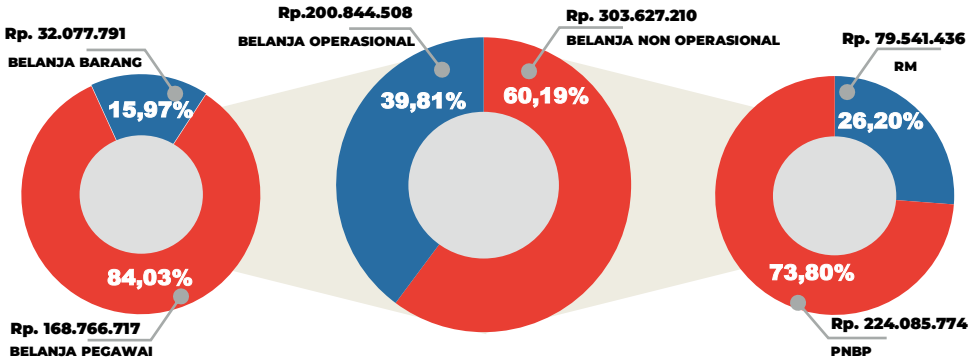
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	QCE – Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	180 Perkara	57.114.694	Mitigasi Perubahan Iklim
		Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	150 Perkara	14.400.000	Mitigasi Perubahan Iklim\
	DCE-Pelatihan Bidang LHK	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang	3.400.000	Mitigasi Perubahan Iklim

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK

KEGIATAN	KRO	RO	VOL	PAGU ('000)	TAGGING
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	6 Layanan	32.438.277	Bukan Tematik
		Layanan Perkantoran	6 Layanan	200.844.508	Bukan Tematik
	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	6 Unit	68.058.900	Bukan Tematik

ALOKASI ANGGARAN PENEGAKAN HUKUM TAHUN 2024



ALOKASI ANGGARAN SATKER

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SATKER	BELANJA OPERASIONAL		BELANJA NON OPERASIONAL		JUMLAH PAGU 2024
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	RM	PNBP	
BALAI GAKKUM SUMATERA	30.500.000.000	5.254.700.000	8.838.259.000	24.252.930.000	68.845.889.000
BALAI GAKKUM JABANUSRA	26.384.000.000	5.416.223.000	7.481.087.000	31.709.740.000	70.991.050.000
BALAI GAKKUM KALIMANTAN	26.366.000.000	3.225.821.000	8.572.597.000	28.247.816.000	66.412.234.000
BALAI GAKKUM SULAWESI	24.583.000.000	3.506.944.000	8.469.320.000	23.460.130.000	60.019.394.000
BALAI GAKKUM MALUKU PAPUA	17.772.344.000	2.946.179.000	7.494.648.000	24.203.920.000	52.417.091.000
SEKRETARIAT DITJEN PHLHK	43.161.373.000	7.468.435.000	18.275.177.000	23.083.944.000	91.988.929.000
DIREKTORAT PPLHK		1.268.080.000	10.695.654.000	13.295.774.000	25.259.508.000
DIREKTORAT PSLH		733.930.000	2.830.000.000	12.270.000.000	15.833.930.000
DIREKTORAT PPSA LHK		1.096.100.000	2.550.000.000	15.552.490.000	19.198.590.000
DIREKTORAT PHP LHK		1.161.379.000	4.334.694.000	28.009.030.000	33.505.103.000
TOTAL	168.766.717.000	32.077.791.000	79.541.436.000	224.085.774.000	504.471.718.000



**OPERASI HASIL HUTAN ILLEGAL, DONGGALA
SULAWESI - 06 AGUSTUS 2023**

BAB IV

PENUTUP

KATA PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2024 tidak hanya mencerminkan semangat untuk memperkuat pencapaian yang telah dicapai pada tahun 2023 seiring catatan yang harus ditindaklanjuti sesuai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) di Tahun 2022, tetapi juga mengandung komitmen untuk meletakkan dasar pencapaian pembangunan pada tahun 2024.

Dokumen ini merinci berbagai upaya dan keberhasilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan berbagai tugas yang dipercayakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perubahan) tahun 2020 hingga 2024, serta Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perubahan) tahun 2020 hingga 2024. Seluruh hasil yang dicapai diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan arahan serta masukan dari Laporan Kinerja tahun sebelumnya, sehingga dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemantauan terhadap upaya pencapaian kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalui Audit Kinerja. Sementara itu, diharapkan Sekretariat Jenderal KLHK dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dihasilkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I – PRIORITAS NASIONAL RKP TA 2024

PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RKP 2024	TARGET RENJA 2024	SATUAN
06 - MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP PERUBAHAN IKLIM	01- MENINGKATNYA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	01 - INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	69.74	69.74	Poin
06.06 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup					
06.01.04 - KP: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Persentase Pemegang Izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang LHK	70	53	%
		02 - Jumlah Kasus Pidana dan Perdata LHK yang ditangani	640	225	Kasus
		03 - Jumlah Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	2.100.000	1.200.000	Hektar
06.01.04.01 - PRO P : Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LH	01- Terlaksananya Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01- Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	1.450	800	Badan Usaha
		03- Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	430	180	Operasi
06.01.04.03- PRO P : Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan LH	01 - Terlaksananya Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH	01. Jumlah Kasus Pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P-21 (Berkas Perkara dinyatakan Lengkap	350	180	Perkara
		02 - Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	110	45	Perkara

Sumber : Lampiran II, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (A.VI.9)

LAMPIRAN II – ARSITEKTUR KINERJA UKE I PER PROGRAM TA 2024

PROGRAM	SASARAN KINERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA ESELON I	VOL	SAT	ANGGARAN 2024 ('000)
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya budaya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	53	%	32.750.000
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang LHK	Jumlah kasus pidana dan perdata yang ditangani	225	Kasus	92.154.694
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman	Luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan hutan, serta perusakan lingkungan	1.200.000	Hektar	78.227.339
029.WA-Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80	Poin	301.339.685
		Nilai Kinerja Anggaran	98,12	Poin	
SUB TOTAL PAGU ALOKASI ANGGARAN DITJEN PHLHK TA 2024					504.471.718

LAMPIRAN III – ARSITEKTUR KINERJA PER KEGIATAN TA 2024

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	VOL	SAT	ANGGARAN 2024 ('000)	
5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	EBA – Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 – Layanan Umum	6	LAYANAN	32.438.277	
		051 - Layanan PEHKT				
		052 - Layanan KKOTL				
			053 - Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tusi Unit			
			052 - Layanan Dukungan Manajemen Satker			
			994 Layanan Perkantoran	6	LAYANAN	200.844.508
	EBA – Layanan Dukungan Manajemen Internal	001 - Gaji dan Tunjangan				
		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
	EBB – Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 – Layanan Sarana Internal	6	LAYANAN	68.056.900	
		051- Pengadaan Kendaraan Bermotor				
		052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				
		053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran				
		054 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan				
SUB TOTAL KEGIATAN - 5427					301.339.685	

LAMPIRAN III – ARSITEKTUR KINERJA PER KEGIATAN TA 2024

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	VOL	SAT	ANGGARAN 2024 ('000)
5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	QHD – Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	100	Operasi	39.570.800
		051 - Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	200	Dokumen	
		052 - Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	98	Operasi	
		053 - Operasi Penyelamatan SDA	2	Operasi	
	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	QHD – Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	80	Operasi	35.656.539
		051 - Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	160	Dokumen	
		052 - Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan	11	Kegiatan	
		053 - Operasi Pembalakan Liar	40	Operasi	
		054 - Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	40	Operasi	
	001- Polisi Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya	DCE - Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	300	Orang	3.000.000
051- Peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan LHK		300	Orang		
052 - Pembentukan Polisi Kehutanan		n/a			
SUB TOTAL KEGIATAN – 5431					78.227.339

LAMPIRAN III – ARSITEKTUR KINERJA PER KEGIATAN TA 2024

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN	VOL	SAT	ANGGARAN 2024 ('000)
		QCE - Penanganan Perkara	45	Perkara	17.240.000
5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	QCE.001 - Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	051 - Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	32	Dokumen	
		052 - Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat	32	Dokumen	
		053 - Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	28	Perkara	
		054 - Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan	4	Perkara	
		055 - Pelaksanaan Persidangan	12	Dokumen	
		056 - Upaya Hukum	13	Perkara	
		057- Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi	2	Dokumen	
		058 - Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	1	Layanan	
SUB TOTAL KEGIATAN - 5429					17.240.000

LAMPIRAN III – ARSITEKTUR KINERJA PER KEGIATAN TA 2024

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN	VOL	SAT	ANGGARAN 2024 ('000)
5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	QIH.001 - Badan Usaha yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan usaha	800	Badan Usaha	30.750.000
		051 - Penanganan Pengaduan Perusahaan	400	Badan Usaha	
		052 - Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	600	Pengaduan	
		053 - Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	400	Badan Usaha	
		054 - Sanksi Administrasi	200	Sanksi	
		DCE - Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	300	Orang	2.000.000
DCE. 001 - PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	051 - Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	300	Orang		
	052 - Pembentukan PPLH	n/a	-		
SUB TOTAL KEGIATAN - 5430					32.750.000

LAMPIRAN III – ARSITEKTUR KINERJA PER KEGIATAN TA 2024

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	VOL	SAT	ANGGARAN 2024 ('000)
5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	QCE – Penanganan Perkara	180	Perkara	57.114.694
		051- Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	200	Dokumen	
		052 - Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	180	Perkara	
		053 - Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	20	Laporan	
		054 - Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana LHK	15	Kegiatan	
	002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	QCE – Penanganan Perkara	150	Perkara	14.400.000
		051 - Pengumpulan bahan dan keterangan atas penggunaan kawasan hutan tanpa izin	150	Dokumen	
		052 - Penyusunan penetapan denda administratif	150	Perkara	
		053 - Verifikasi lapangan atas ketaatan terhadap penerapan denda administrative	45	Dokumen	
		001- PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	DCE-Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200	
051 - Peningkatan PPNS LHK	170	Orang			
052 - Pembentukan PPNS LHK	30	Orang			
SUB TOTAL KEGIATAN – 5431					74.914.694

LAMPIRAN IV – TARGET PER SATUAN KERJA TA 2024

KODE	UKE I/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	TARGET	SATUAN	PPH	PHP	PSLH	PPSA	SETDIT	SUM	JBN	KAL	SUL	MAP
DITJEN. PENEGAKAN HUKUM LHK													
029.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK												
	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	80	Poin										
	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHLHK	98.12	Poin					98,12*	97,41	95,53	96,41	96,86	93,65
029.FF	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN												
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan												
01.DCE.001	Polisi Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya	300	Orang	225					15	15	15	15	15
01.QHB.001	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	80	Operasi	15					20	15	20	20	10
01.QHB.002	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	80	Operasi	10					18	15	12	17	8
029.FD	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP												
5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup												
01.QCE.001	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	45	Perkara			36			2	2	2	2	1
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi												
01.DCE.001	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	250	Orang				250						
01.QIH.001	Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	800	Badan Usaha				310		99	124	130	111	26
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan												
01.DCE.001	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	200	Orang		200								
01.QCE	Penanganan Perkara												
01.QCE.001	Kasus Tindak Pidana LHK P21	180	Perkara		15				42	40	40	30	13
01.QCE.002	Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan	150	Perkara		150								

* Nilai Kinerja Anggaran (NKA) TA 2024 Kantor Pusat sebesar 98,12 Poin dan 5 (Lima) Unit Pelaksana Teknis.

LAMPIRAN V – TARGET PER RINCIAN OUTPUT PER LOCUS

KODE	UKE I/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	LOCUS
	DITJEN. PENEKAKAN HUKUM LHK	
029.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK	
029.FF	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	
01.DCE.001	Polisi Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Makassar dan Manokwar
01.QHB.001	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Sumut, Jambi, Riau, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Sulbar, Sulteng, Sulsel, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat.
01.QHB.002	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Sumut, Jambi, Riau, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Sulbar, Sulteng, Sulsel, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat
029.FD	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	
5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	
01.QCE.001	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	Sumut, Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Jabar, Jateng, Jatim, Sulteng, Kepri, NTT, Papua dan Papua Barat.
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	
01.DCE.001	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Makassar dan Manokwari
01.QIH.001	Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	34 Provinsi, 415 Kabupaten, 1 Kabupaten Administrasi, 93 Kota, dan 5 Kota Administrasi.
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
01.DCE.001	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Makassar dan Manokwari
01.QCE	Penanganan Perkara	
01.QCE.001	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Sumut, Jambi, Riau, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Sulbar, Sulteng, Sulsel, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat.
01.QCE.002	Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan	Sumut, Jambi, Riau, Babel, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Sultra, Papua, Sulsel, Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Maluku, Sulut dan Sulteng